

Keluarga sebagai Lingkungan
EDUKASI ANTIKORUPSI



Oleh :
Pdt. Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th

KELUARGA SEBAGAI LINGKUNGAN EDUKASI ANTI KORUPSI

Penulis :

PDT. DR. DJOYS ANNEKE RANTUNG, M.TH.



**UKI Press
2020**

KELUARGA SEBAGAI LINGKUNGAN EDUKASI ANTIKORUPSI

Penulis :

PDT. DR. DJOYS ANNEKE RANTUNG, M.TH.

Editor :

Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-7256-54-0

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta
13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.



**UKI Press
2020**

Kata Pengantar

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara. Meski demikian keluarga memiliki peranan yang sangat strategis dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh kualitas kehidupan yang baik dalam keluarga. Demikian juga sebaliknya, apabila keluarga mengalami berbagai persoalan, seperti relationship, social bahkan ekonomi maka dengan sendirinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berujung pada kemunduran kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dinyatakan bahwa keluarga merupakan pilar masa depan bagi suatu bangsa dan negara. Aspek pendampingan bagi pertumbuhan pendidikan secara holistic menjadi sangat relevan dan strategis salah satunya berkaitan dengan issue korupsi.

Persoalan korupsi bukan lagi menjadi domain pemerintah dalam hal penjegahan melainkan telah menjadi tanggungjawab warga masyarakat terlebih keluarga. Peran keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga salah satu garba terdepan dalam memerangi korupsi. Melalui buku yang berjudul; *Keluarga Sebagai Lingkungan Edukasi Antikorupsi* penulis ingin mengajak pembaca berefleksi akan begitu pentingnya pendidikan dilingkup keluarga. Pendidikan Agama Kristen (PAK), lebih khusus PAK Keluarga disadari memiliki tanggung jawab secara langsung atas permasalahan korupsi tersebut. Dalam arti, bahwa PAK mestinya dapat memperlengkapi setiap warga gereja

dengan moralitas dan spiritualitas yang mengutamakan kejujuran, keadilan dan solidaritas untuk semua.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi dalam berbagai diskusi, baik itu kalangan aktivis, gereja, lembaga pendidikan bahkan mahasiswa dan masyarakat secara umum. Buku ini juga merupakan jawaban atas perkembangan terhadap peran keluarga dalam membina, mendidik dan mendampingi keluarga agar persoalan korupsi semakin hari dapat semakin tereliminir.

Dengan diterbitkannya buku ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang telah banyak berkontribusi sampai akhir proses sehingga saat ini buku tersebut ada ditangan para pembaca. Terima kasih kami sampaikan pada penerbit UKIPress yang telah banyak membantu sehingga buku ini dapat terbit. Tak ada gading yang tak retak, maka berbagai masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan agar melalui itu semua buku ini menjadi semakin proporsional dalam membangun keluarga dan membantu pemerintah dalam memerangi korupsi.

Jakarta, Maret 2020

Djoys Anneke Rantung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Korupsi Sebagai Tantangan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Keluarga	2
1.2 PAK Keluarga dan Tanggungjawab Edukasi Antikorupsi.....	5
1.3 Fokus Perhatian Buku Ini.....	6

BAB II MEMAHAMI KORUPSI

2.1 Pengertian Korupsi	8
2.2 Faktor Penyebab Korupsi.....	14
2.3 Jenis-jenis Korupsi	25
2.4 Dampak Masif Korupsi.....	30

BAB III PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM KELUARGA

3.1 Pengertian, Maksud dan Tujuan PAK Keluarga .	36
3.2 Hakikat PAK Keluarga	47
3.2.1 Konsep Keluarga dalam Pandangan Alkitab	47
3.2.2 Bentuk dan Dimensi-dimensi Keluarga	50
3.2.3 Manusia Sebagai MakhluK Sosial	54
3.2.4 Keluarga Kristen sebagai <i>Home Based</i> Pendidikan Kristiani	56

BAB IV PERAN KELUARGA KRISTEN SEBAGAI LINGKUNGAN EDUKASI ANTI KORUPSI

4.1	Pemahaman, Fungsi dan Peran Keluarga	61
4.2	Membangun dan Mengembangkan Karakter Kristiani dalam Keluarga	66
4.3	Orang Tua sebagai <i>Role Model</i> Pembentukan Karakter Kristiani	75
4.4	Perilaku Antikorupsi.....	77
4.5	Nilai-nilai Kristiani Antikorupsi	82
4.6	Prinsip-prinsip Antikorupsi.....	86
4.7	Strategi Tindakan Antikorupsi	91

BAB V PENUTUP SEBUAH REFLEKSI TEOLOGIS. 100

Daftar Pustaka.....	110
---------------------	-----

**KELUARGA SEBAGAI LINGKUNGAN
EDUKASI ANTIKORUPSI**

Oleh

PDT. DR. DJOYS ANNEKE RANTUNG, M.TH.

Bab I

Pendahuluan

1.1 Korupsi sebagai Tantangan Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Keluarga

Salah satu agenda Reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi, mulai di lingkungan pemerintah, swasta dan semua sektor di masyarakat. Dalam upaya-upaya pengungkapan kemudian, didapati bahwa, korupsi ternyata sudah mengakar dan tersebar massif di dalam birokrasi dan juga seolah telah menjadi hal biasa di dalam masyarakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa korupsi merupakan masalah penting di Indonesia.

Praktek korupsi yang terus meluas memiliki dampak yang merusak. Korupsi menyebabkan kemiskinan. Sementara, menuut Mahatma Gandhi, 'Kemiskinan adalah bentuk terburuk dari kekerasan.'¹

Laporan Akir Tahun 2016 Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan angka-angka yang

¹ Lihat ulasan seluk-beluk korupsi terkait dengan pemiskinan dalam Maria Hartiningsih (Ed.), *Korupsi yang Memiskinkan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011).

mencengangkan terkait praktek korupsi, suap dan sejenisnya.²

No	Kasus	Jlm Kasus	Kerugian Negara
1.	Korupsi	238 Kasus	Rp 1 triliun
2.	Suap Menyuap	33 Kasus	Rp 32,4 Miliar
3.	Pemerasan	7 Kasus	Rp 20,5 Miliar
4.	Gratifikasi	2 Kasus	-
5.	Penggelapan	3 Kasus	Rp 2,3 Miliar
6.	Benturan PBJ	2 Kasus	-
7.	Blm. Diketahui	197 Kasus	Rp 442 Miliar

Kerugian keuangan negara tertinggi terjadi dalam kasus korupsi. Fakta ini sekaligus makin memperkuat bahwa praktek korupsi adalah masalah besar di Indonesia. Meskipun pemerintah melalui aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha sekuat tenaga melakukan pencegahan dan penindakan namun korupsi masih saja terjadi. Media setiap minggu memberitakan oknum-oknum tertentu dari berbagai wilayah di Indonesia tertangkap tangan dan ditahan atas laporan masyarakat.

Praktek korupsi seolah telah menjadi sesuatu yang patologis. Sejumlah pendapat dirumuskan untuk

² ICW, *Annual Report 2016 Indonesia Corruption Watch: Menyemai Semangat Anti Korupsi*, (ICW: Jakarta, 2016), 21.

mengklasifikasi penyebab korupsi. Satu hal yang menjadi dasar dari penyebab seseorang melakukan korupsi adalah masalah moral dan kepribadian. Meskipun tentu sistem birokrasi dan pengawasan hukum adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktek korupsi.

Pendidikan Agama Kristen (PAK), lebih khusus PAK Keluarga disadari memiliki tanggung jawab secara langsung atas permasalahan korupsi tersebut. Dalam arti, bahwa PAK mestinya dapat memperlengkapi setiap warga gereja dengan moralitas dan spiritualitas yang mengutamakan kejujuran, keadilan dan solidaritas untuk semua.

Melalui PAK gereja mendidik umatnya tentang kasih Allah, tentang etika, moral dan kepedulian gereja di dalam dunia. Gereja yang dimaksud di sini tentu terutama bukan hanya gedung dan institusinya, tapi sebuah persekutuan orang-orang percaya yang karena kepercayaan itu, umat memiliki tanggung jawab dan mestinya komitmen untuk melaksanakan misi Allah. PAK secara terus menerus, dengan program yang terencana mengajarkan umat mengenai misi Allah itu, prinsip dan nilainya serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan bersama orang lain di dunia ini.

Dengan esensi PAK tersebut, maka korupsi dapat dikatakan sebagai tantangan dan pergumulan iman yang

secara sederhana diistilahkan, 'korupsi adalah masalah teologis' bagi PAK.

1.2 PAK Keluarga dan Tanggungjawab Edukasi Antikorupsi

Meski masalah korupsi disadari merupakan juga tanggungjawab PAK dalam proses-prosesnya, namun sejumlah masalah kaitan dengan paradigma, konsep dan metode PAK yang menjadikan keluarga sebagai subjek atau basis edukasi antikorupsi masih merupakan tantangan untuk digumuli.

Masalah yang dijumpai berdasarkan hasil observasi, bahwa korupsi cenderung masih dilihat sebagai masalah politik dan hukum. Memang fakta menunjukkan bahwa korupsi terutama terjadi di ranah pemerintahan atau terkait dengan penyelenggaraan birokrasi, politik dan ekonomi negara. Namun, mestinya upaya pencegahan antara lain melalui pendidikan antikorupsi dimulai dari dalam keluarga. Generasi yang terus berganti dan kemudian menjadi bagian dari penyelenggaraan institusi birokrasi, swasta dan lain sebagainya semua bermula dari keluarga.

Lebih khusus pada keluarga-keluarga Kristen, dari observasi didapati belum secara maksimal difasilitasi oleh gereja melalui PAK untuk menjadi basis edukasi anti

korupsi. Keluarga-keluarga Kristen cenderung masih dipahami sebagai basis-basis kerohanian *an sich*. Hal ini terkait dengan pemahaman teologis yang masih umum terdapat di dalam gereja bahwa urusan politik, ekonomi, dan birokrasi serta hukum adalah urusan negara.

Masalah tersebut sangat berkaitan dengan paradigma, rumusan konsep dan metode PAK Keluarga sebagai basis edukasi antikorupsi yang relatif belum terumus dengan baik. Sementara, sebagaimana unsur pendidikan, PAK selain untuk memperkaya pengetahuan, pertumbuhan iman, namun juga pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan-kemampuan praktis.

1.3 Fokus Perhatian Buku ini

Studi-studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) terus berkembang dan dikembangkan meliputi dimensi-dimensi yang lebih luas kehidupan gereja dan masyarakat. PAK Keluarga merupakan salah satu bidang kajian PAK yang berfokus pada kajian dan pengembangan PAK yang berbasis keluarga. Keluarga adalah subjek edukasi atau pembelajaran pendidikan kristiani.

Keluarga yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang adalah individu-individu sekaligus juga adalah institusi sosial. Ayah dan ibu memiliki fungsi-fungsi sosial di dalam masyarakat, gereja dan dunia kerja. Anak-anak

adalah subjek pembelajar dalam PAK Keluarga. Anggota keluarga dewasa secara formal atau informal, dari perspektif PAK keluarga adalah guru atau pengajar iman, moral, etika dan teladan kristiani.

Setiap keluarga Kristen di Indonesia hidup dalam suatu masyarakat atau negara yang menghadapi masalah praktek korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat. Iman Kristen yang diajarkan oleh gereja mendorong umat untuk hidup dalam kejujuran yang jika dikembangkan lebih luas nilai ini berhubungan dengan perilaku, sikap atau karakter antikorupsi.

Dalam kaitan dengan topik edukasi (pendidikan) antikorupsi studi PAK Keluarga, buku ini terutama memberi perhatian terhadap nilai-nilai Kristiani yang dikembangkan dalam keluarga yang mengajarkan, menanamkan dan meneladankan perilaku antikorupsi. Dengan demikian, buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan yang substansial hubungan PAK Keluarga dengan korupsi, yaitu, “Bagaimana keluarga sebagai basis pendidikan agama Kristen mengajarkan nilai dan sikap antikorupsi?”

Bab II

Memahami Korupsi

2.1 Korupsi dan Dampaknya

2.1.1 Pengertian Korupsi

Korupsi telah ada dan menjadi masalah sejak awal sejarah manusia. Korupsi dan peluruhan moral secara umum telah dilihat sebagai faktor utama yang menjelaskan kemunduran Kekaisaran Romawi, sementara Reformasi Protestan tidak lain adalah respon terhadap bentuk-bentuk korupsi yang dirasakan, termasuk penjualan indulgensi yang tidak semestinya, dalam Gereja Katolik.³

Leslie Holmes mengatakan, dalam pengertian tradisionalnya, korupsi mengacu pada kenajisan moral. Kata 'korupsi' sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti 'merusak, mencemari, menyalahgunakan, atau menghancurkan', yang penggunaannya tergantung konsep. Tapi konsep korupsi telah berubah selama berabad-abad di antara budaya yang berbeda-beda. Istilah ini telah digunakan secara luas untuk menggambarkan penyimpangan dari norma yang dianggap tidak benar. Di

³ Leslie Holmes, *Corruption: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), 1

masa lalu, dan sampai hari ini di negara-negara seperti Iran, korupsi sering dikaitkan dengan norma agama.⁴

Secara etimologis, istilah 'korupsi' berasal dari kata Latin 'corruptus' yang berarti: "mencemari atau merusak kemurnian."⁵ *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *Corruption* sebagai "perilaku ilegal, buruk, atau tidak jujur, terutama oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan."⁶ Definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi adalah: "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain."⁷

Di Indonesia sejak reformasi bergulir, korupsi telah menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, oleh negara secara hukum korupsi dimasukkan dalam tindakan melawan hukum. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, definisi tindak korupsi seperti yang disebutkan pada Bab II pasal 2 adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

⁴ Holmes, *Corruption...*

⁵ "Corrupt",

http://etymonline.com/index.php?term=corrupt&allowed_in_frame=0

⁶

"Corruption",

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption>

⁷ "Korupsi", <http://kbbi.web.id/korupsi>

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pada pasal tiga UU tersebut disebutkan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

World Bank mendefinisikan praktik korupsi sebagai praktek “pemberian, penerimaan atau permintaan, secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar.” (A corrupt practice is the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, anything of value to influence improperly the actions of another party.)

Sebagai contoh, “pemasok setuju untuk membayar "suap" kepada pejabat senior pemerintah melalui agen yang dipekerjakannya sebagai *subconsultant* untuk melakukan layanan "pengembangan bisnis dan pemasaran" namun tanpa kiriman apapun. Agen ini terhubung dengan pejabat pemerintah senior yang menuntut "komisi" dari setiap penawar karena pejabat tersebut memiliki pengaruh atas komite evaluasi penawaran dan dapat mengajukan penghargaan kontrak kepada setiap penawar yang bersedia membayar. Pemasok ini membangun jumlah pengembalian sebagai persentase dari nilai kontrak, dan membayarnya dari dana yang diterimanya dari proyek yang didanai oleh Kelompok Bank Dunia. Biaya pembiayaan proyek secara artifisial meningkat dengan praktik ini, dan pemasok

memulihkan biaya dengan menyediakan barang dengan kualitas lebih murah dan lebih rendah.”

Sementara praktik kolusi “adalah pengaturan antara dua atau lebih pihak yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak benar, termasuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar.” (A collusive practice is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including influencing improperly the actions of another party.)

Sebagai contoh: Seorang pejabat proyek mengatur untuk mengarahkan kontrak pada proyek yang didanai Bank Dunia ke perusahaannya sendiri dan kerabatnya. Pejabat proyek tidak hanya memberitahu perusahaan kerabatnya berapa harga yang harus dimasukkan ke dalam penawaran mereka, tapi juga spesifikasi teknis tertentu yang harus disertakan. Tawaran perusahaan yang bukan bagian dari "lingkaran dalam" ini didiskualifikasi karena secara teknis tidak responsif, membuat perusahaan pejabat proyek dan kerabatnya sebagai penawar terendah yang dievaluasi pada kontrak yang berbeda. Tidak hanya integritas proses pengadaan yang dikompromikan, namun

harga penawaran yang menang jauh lebih tinggi daripada penawaran tender yang kompeten.⁸

Edy Herry Pryhantoro⁹ mengatakan, sejak awal, tindakan korupsi dimaknai sebagai hasil atau akibat perbuatan buruk, jahat atau rusak. Robert Klitgaard seperti dikutip Pryhantoro dari bukunya "Corrupt Cities" menuliskan, yang dimaksud dengan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Klitgaard mengklasifikasikan korupsi menjadi dua; yaitu *freelance* dan sistemik. Tindakan korupsi dikategorikan *freelance* apabila individu atau kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang mendukung terjadi penyuapan. Sedangkan tindakan korupsi dikategorikan sistemik jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi politik. Pembedaan korupsi juga dapat dilakukan atas kategori korupsi aktif dan korupsi pasif.

Seseorang atau kelompok dikatakan melakukan korupsi aktif jika terlibat dalam tindakan korupsi tersebut atau membayar untuk sesuatu yang dilarang oleh aturan formal yang berlaku. Sedangkan dikatakan korupsi pasif

⁸ The World Bank, "What is Fraud and Corruption?", <http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption>

⁹ Edy Herry Pryhantoro, *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*, (Spasi, 2016)

jika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Baik yang bersifat aktif maupun pasif, jika terdapat bukti yang cukup bisa dikenai dakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Pryhantoro melanjutkan, pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang, yakni orang per orang dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi, yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

2.1.2 Faktor Penyebab Korupsi

Terdapat beberapa penyebab terjadi korupsi dalam suatu negara, baik secara mikro maupun makro. Namun sebab utama adalah mental setiap orang. Contoh, seorang petani, yang serba berkekurangan pun dapat dipakai sebagai objek oleh seorang pegawai negeri sipil di

Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. Bantuan pemerintah yang memang diperuntukan bagi si petani, tapi karena pegawai negeri sipil tersebut ingin memperkaya diri sendiri sebagai wujud moral yang buruk, maka bantuan misalnya Rp. 10.000.000 akan dipotongnya dengan segala macam alasan, sehingga uang bantuan yang sampai ke petani hanya berjumlah Rp. 7.500.000. Tapi sebaliknya, contoh lagi, seorang pengusaha industri rumah tangga untuk segera mendapat ijin usaha dari pemerintah, dan karena pelayanan publik buruk, maka untuk segera mendapat ijin si pengusaha tersebut terpaksa harus menyuap petugas di dinas pemerintah agar ijinnya segera keluar.

Wijayanto dalam buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan* menuliskan:

Korupsi hanya akan terjadi jika dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu adanya keinginan untuk korup (*willingness to corrupt*), faktor yang sifatnya internal tetapi bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, dan kesempatan untuk korupsi (*opportunity to corrupt*), faktor yang sifatnya eksternal.¹⁰

¹⁰ Wijayanto, "Memahami Korupsi" dalam Wijayanto, (ed.), *Mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 6

Menurut Wijayanto setidaknya ada tiga yang memungkinkan terjadinya praktek korupsi, yaitu: (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.¹¹

➤ ***Faktor Moral***

Wijayanto melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, “manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berupaya memaksimalkan manfaat atas setiap aktivitas dengan biaya seminimal mungkin.” Prinsip ekonomis seperti ini dapat membuat manusia menjadi serakah dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Wijayanto menyebut hal itu dengan istilah *selfish* yang merupakan awal munculnya sifat *greed* atau serakah, akar dari mentalitas korup. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa sebenarnya dalam diri manusia sesungguhnya sudah ada benih atau kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi.

¹¹ Wijayanto, “Memahami Korupsi, 6.

Manusia bukanlah malaikat yang mempunyai moralitas tinggi yang stabil. Manusia jujur pun bisa saja berbuat tidak jujur karena keterpaksaan. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja tidaklah reliable. Selain berfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Banyak koruptor yang ketika masih muda atau pada periode awal kepemimpinannya adalah individu yang mempunyai integritas tinggi. Seperti diulas di awal tulisan ini, banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara demokratis karena mengangkat isu pemberantasan korupsi, tetapi jatuh akibat kasus korupsi. *Opportunity* merupakan faktor kedua yang memungkinkan korupsi terjadi. Upaya menekan kesempatan terjadinya korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yang lebih *accountable*. Proses tender terbuka terkait dengan pemesanan barang atau

penentuan kontraktor merupakan contoh klasik upaya tersebut.¹²

Akuntan Nikaragua Francisco Ramirez Torres, seperti dikutip Robert Kitgaard, membahas panjang lebar beberapa faktor: keluarga, tingkat pendidikan, sikap pada pekerjaan, dunia usaha atau kementerian, negara, dan situasi internasional. Pada tingkat individu, ia menyebutkan sebagai penyebab korupsi, antara lain, minum minuman keras secara berlebihan, selingkuh, rugi dalam spekulasi, 'ingin cepat kaya melalui cara tidak sah...'¹³

Uraian Ramirez diringkas oleh Kitgaard sebagai berikut: *Sebagai langkah awal dapat kita katakan, pejabat akan tergoda melakukan korupsi bila hasil korupsi lebih besar dari sanksi bila tertangkap kali probabilitas tertangkap. Sanksi mencakup gaji dan insentif lainnya yang harus dikorbankan jika ia kehilangan pekerjaan dan besar hukuman. Kapan hasil korupsi itu besar? Pejabat memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat dari korupsi, yang ditentukan oleh monopoli yang dimilikinya atas suatu jasa layanan atau kegiatan, wewenangya memutuskan*

¹² Wijayanto, "Memahami Korupsi, 27.

¹³ Robert Kitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 37

*siapa yang mendapat layanan, berapa besar, dan oleh sampai seberapa jauh akuntabilitasnya dalam melakukan tugas.*¹⁴

➤ ***Faktor Keluarga***

Penyebab korupsi oleh keluarga, ini sebenarnya menyangkut nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut yang membentuk moralitas mereka. Keluarga pejabat yang memiliki gaya hidup mewah, sementara gaji dari entah suami atau istri sebagai pejabat tidak sebesar dibanding pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup mereka yang mewah. Anak-anak ke sekolah dengan mobil mewah butuh dana ekstra untuk beli bensin, perawatan mobil, dan lain sebagainya yang terkait. Biasanya, anak-anak pejabat tentu harus menyesuaikan dengan tingkat sosial keluarganya dalam bergaul dengan teman-temannya. Gaya hidup *shopping* di mall, bersenang-senang di club malam, sepatu, kaos, celana, tas, parfum yang harus mahal, tentu butuh dana pengeluaran yang besar. Dari mana ayah atau ibu mereka mendapatkan dana lebih? Dari korupsi tentunya.

➤ ***Faktor Tingkat Pendidikan***

Penyebab korupsi karena tingkat pendidikan, tentu kebanyakan berlaku pada masyarakat yang miskin di

¹⁴ Kitgaard, *Penuntun Pemberantasan*, 38.

pedesaan atau perkotaan. Tingkat pendidikan, kemiskinan dan korupsi saling terkait. Dana pemerintah untuk pembangunan yang dialokasikan untuk pendidikan dikorupsi oleh pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah hasilnya adalah fasilitas tidak memadai, tingkat kesejahteraan guru tidak memadai, hasilnya adalah kualitas pendidikan yang rendah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan menjadi objek bagi pegawai pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri atau secara tidak sadar masyarakat akan terlibat pada 'rantai' korupsi, misalnya dalam hal bantuan atau pengurusan perijinan.

Pada tingkat makro, di kalangan pejabat pemerintahan misalnya, korupsi mulai terjadi ketika seseorang orang memutuskan meniti karir di bidang politik menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Dana kampanye yang tidak kecil adalah sebuah perjudian. Kalah bangkrut, menang akan dipahami sebagai peluang dan kesempatan untuk mengembalikan modal sendiri atau pinjaman yang dipakai selama kampanye. Dalam banyak kasus, para calon pejabat atau pejabat negara ini melibatkan orang-orang swasta.

➤ *Faktor Politik dan Birokrasi*

Dalam laporan tahunan 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tiga provinsi yang

dikategorikan sebagai “darurat korupsi.” Ketiganya adalah Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Kasus demi kasus korupsi menerpa pejabat di ketiga provinsi tersebut. Tidak hanya eksekutif, legislatif, tetapi juga aparat penegak hukum. Sebesar 32 persen kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004 sampai 2016 pelakunya adalah aktor politik. Modusnya adalah pengadaan barang dan jasa (148 kasus), perizinan (20 kasus), pencucian uang (17 kasus), pungutan (21 kasus). Dari data kasus tindak pidana korupsi dunia pendidikan 2006-2015, tak kurang dari 400 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan kasus korupsi di bidang kesehatan pada 2001- 2013, terdapat 100-an kasus korupsi yang berdampak pada kerugian negara mencapai Rp594 miliar.¹⁵ Selama 2004-2016, tercatat 124 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi, 117 gubernur, dan 58 walikota/bupati/wakilnya.

Menurut KPK, munculnya berbagai kasus korupsi dan suap, adalah cermin atas tidak terkelolanya pendidikan tentang demokrasi dan politik di Indonesia. Begitu pula dengan praktik politik uang, tindak penyalahgunaan kesempatan, jabatan atau wewenang yang merugikan masyarakat dan melibatkan para politisi sebagai pelaku.

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2016*, (Jakarta: KPK, 2017), 2 dan 10.

KPK memberi contoh misalnya, adalah besarnya biaya politik yang digunakan calon kepala daerah dalam sebuah Pilkada. Tingginya biaya tersebut, berpotensi memunculkan pemerintahan daerah yang koruptif. Sebab, ketika mereka terpilih, maka yang terpikir adalah upaya mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan. Besarnya biaya politik, dapat dilihat dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kajian itu menyebutkan, biaya yang dipergunakan seseorang untuk menjadi seorang bupati/walikota berkisar Rp 20-30 miliar. Sedangkan calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

➤ *Faktor Struktural dan Sejarah*

Penyebab korupsi lain adalah faktor struktural dan sejarah, yaitu struktur oligarki yang dikuasai oleh elit lama. Sujanarko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, desentralisasi menciptakan aktor dan modus baru korupsi di Indonesia, seperti misalnya Pilkada. Berikutnya adalah kualitas regulasi untuk usaha, misalnya dalam pemberian izin usaha. Kualitas peradilan juga menjadi salah satu

penyebab timbulnya korupsi. Penyebab korupsi lainnya adalah melimpahnya sumber daya alam suatu negara.¹⁶

Praktek korupsi sudah dari zaman kolonial Belanda. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintah Orde Lama. Rezim orde baru sangat korup. Ketika reformasi bergulir, istilah KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi populer. Upaya pemberantasan korupsi, karena praktek ini telah menjadi bagian dari struktur sosial, politik, ekonomi yang berakar dalam sejarah rezim yang sentralistik dan tertutup, maka pada banyak kasus, korupsi seolah-olah sudah dianggap hal biasa.

Ermansjah Djaja¹⁷ mensistematisasi penyebab-penyebab tersebut menjadi delapan hal, yaitu:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru – Sebagai negara yang berkembang seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai dengan era Reformasi, pembangunan difokuskan di bidang

¹⁶ KPK, “KPK: Jangan Menganggap Korupsi itu Budaya”, <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3617-kpk-jangan-menganggap-korupsi-itu-budaya>

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI nomor 20 tahun 2001 versi UU RI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

ekonomi. Padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan jumlah SDM, uang, manajemen dan teknologi. konsekuensinya, semua diimpor dari luar negeri.

2. Kompensasi PNS yang Rendah – Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tidak diimbangi dengan pola hidup yang sederhana, karena sebagian besar pegawai memiliki gaya hidup yang konsumtif.
3. Pejabat yang Serakah – karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan. Kemudian lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.
4. Law Enforcement Tidak Berjalan – Penegakkan hukum di Indonesia sangatlah bobrok. penegakkan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor – Karena para koruptor mendapat hukuman yang ringan, maka tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang

melakukan korupsi. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN.

6. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin - Minimnya pemimpin yang dapat dijadikan teladan, menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari jerat korupsi. Hal ini menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara mendekati jurang kehancurannya.
7. Pengawasan yang Tidak Efektif Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN - Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakatnya cenderung peternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari. Misal mengurus KTP, SIM, PBB dan masih banyak lagi. Hal tersebut mereka lakukan karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai tindakan yang wajar.

2.1.3 Jenis-Jenis Korupsi

Terdapat banyak sekali bentuk korupsi, dari yang tersamar, terang-terangan hingga praktek yang rumit dan kompleks karena dilakukan oleh pejabat, pengusaha dan bahkan pemimpin negara. Secara garis besar, Wijayanto

mengelompokkan praktek korupsi pada dua jenis, yaitu: Grand Corruption dan Petty Corruption.¹⁸

➤ *Grand Corruption*

“Grand corruption atau korupsi besar adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.” Korupsi disebut juga *corruption by greed* atau korupsi akibat keserakahan karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara materiil.

Contoh paling jelas adalah praktek korupsi di masa rezim Soeharto selama orde baru. Kroni-kroni Soeharto hingga keluarga menguasai sumber-sumber daya alam Indonesia untuk memperkaya diri dan kelompok. Utang luar negeri miliaran US Dollar diwariskan oleh Soeharto kepada pemerintahan reformasi, tapi lebih daripada itu kemiskinan yang luas pada rakyat Indonesia kebanyakan.

Di masa orde baru, pejabat dari pusat, di kementerian-kementerian, hingga pejabat daerah terlibat dalam praktek korupsi. Setidaknya, kebanyakan pejabat itu terjebak dalam sistem politik, ekonomi dan birokrasi yang korup. Karena korupsi terjadi dalam skala yang luas, maka seolah-olah korupsi adalah hal wajar. Maka lahirlah moral

¹⁸ Wijayanto, “Memahami Korupsi, 17-

dan mental korup, pun di kalangan warga negara kelas menengah ke bawah.

Wijayanto menjelaskan, “modus operandi yang umum terjadi adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan para pengambil kebijakan publik.” Melalui pengaruh yang dimiliki, kelompok kepentingan tertentu memengaruhi pengambil kebijakan guna mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu besar dan seolah dapat mengontrol proses perumusan kebijakan publik, fenomena ini sering disebut dengan *state capture* atau *elit capture*.

State capture terjadi dalam berbagai bentuk. World Bank – dalam bukunya *Anti-Corruption in Transition*, seperti dikutip Wijayanto, menjabarkan beberapa bentuk *state capture* yaitu:

- (1) suap kepada anggota DPR untuk memengaruhi perundangan,
- (2) suap kepada pejabat negara untuk memengaruhi kebijakan publik,
- (3) suap kepada lembaga peradilan untuk memengaruhi keputusan terkait dengan kasus-kasus besar,
- (4) suap kepada pejabat bank sentral untuk memengaruhi kebijakan moneter, dan,

(5) sumbangan kampanye ilegal untuk partai politik.

➤ ***Petty Corruption***

"Petty corruption atau korupsi kecil, sering disebut *survival corruption* atau *corruption by need*, adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai." Korupsi kecil merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara yang gagal menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik, seperti di Indonesia. Meski disebut korupsi kecil, namun praktek ini tetap saja disebut korupsi sebagai tindakan yang tidak benar. Sebab, seperti kata Wijayanti, *pertama*, kendati nilai kerugian per-kejadian relatif kecil, tetapi dikarenakan jumlah kejadian yang masif, total kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat akibat korupsi ini sangat besar. *Kedua*, korupsi kecil menyangkut sisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Apabila tidak segera ditanggulangi, masyarakat akan menganggap korupsi sebagai bagian dari keseharian mereka yang akan menciptakan masyarakat yang permisif dan toleran terhadap korupsi. Apabila ini terjadi, upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberantas korupsi akan semakin sulit dilaksanakan. *Ketiga*, korupsi kecil menyemai korupsi besar.

Menurut Budi Winarno, korupsi terjadi dalam beberapa lapisan. *Pertama*, korupsi terjadi dalam bentuk "balas jasa" dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya atas sesuatu yang disepakati. *Kedua*, model korupsi dalam aring-jaring korupsi (cabal) antarbirokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra seperti yang dikutip Winarno, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional. *Ketiga*, model korupsi yang berlangsung dalam lingkup internasional di mana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya "terlebih" oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaring-jaring korupsi internasional tersebut.¹⁹

¹⁹ Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang dan Ancaman Bagi Indonesia*, (66

2.1.4 Dampak Masif Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) seperti diberitakan *Tempo.co*²⁰ menyatakan lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang 2016. Menurut Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar, tepatnya ada Rp 3,085 triliun nilai kerugian negara akibat perkara korupsi. Sementara jumlah denda dari perkara korupsi di tahun yang sama mencapai Rp 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 720,269 miliar. Suap (dari perkara korupsi) sejumlah Rp 2,605 miliar, USD 212.000, dan SGD 128.700.

Sementara menurut Peter Carey, sejarawan asal Inggris, kerugian yang diderita negara akibat praktik korupsi selama kurun waktu tahun 2001-2015 di Indonesia mencapai Rp. 205 triliun. Ia mengatakan, nilai yang hilang atau sebesar Rp183 triliun itu setara dengan seluruh anggaran untuk pembangunan 871 kilometer jalan tol dan jalan baru. Korupsi terbesar, menurutnya, ada di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) dan korporasi.

Sujanarko dari KPK mengatakan, korupsi bisa merusak harga pasar, demokrasi, kualitas hidup, dan

²⁰ "Sepanjang 2016, Negara Rugi Rp 3 Triliun Dari Kasus Korupsi",
<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/04/063852637/sepanja-ng-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi>

mengancam kesinambungan pembangunan.²¹ Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Kebijakan yang korup dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya hutan selain mengakibatkan kerusakan alam juga kemiskinan akibatnya terpinggirnnya masyarakat pedesaan sekitar hutan oleh perusahaan nasional maupun multinasional. Kemiskinan, kekerasan, diskriminasi antar kelompok dapat dihubungkan dengan dampak-dampak luas dari korupsi.

Kemiskinan antara lain disebabkan oleh politik anggaran yang tidak memihak rakyat. Anggaran negara untuk pembangunan, selain habis untuk belanja rutin untuk urusan-urusan birokrasi, membayar utang, namun juga banyak yang justru dikorupsi.²² Data dari Badan Pusat Statistik untuk angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2017 masih menunjukkan angka yang signifikan, yaitu sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Persentase penduduk miskin di

²¹ KPK, "KPK: Jangan Menganggap..."

²²Maria Hartiningsih (ed.), *Korupsi yang Memiskinkan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 14.

daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.²³

Setidaknya ada empat dampak korupsi bagi Indonesia, menurut Holloway seperti dikutip Winarno²⁴, yakni hilangnya modal sosial, hilangnya modal finansial, hilangnya modal fisik, dan hilangnya modal manusia.

Pertama, hilangnya modal sosial. Kekerasan sosial, seperti pencurian, perampokan, atau penjambretan barang milik orang lain tewas mengenaskan karena dihakimi oleh massa menjadi pemandangan umum di masyarakat perkotaan Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seperti 'main hakim sendiri' kerap menyebabkan konflik meluas menjadi antar kelompok. Hal ini terjadi akibat sangat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Kuatnya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa jika seorang pencopet atau penjambret diserahkan ke polisi tidak akan diberi hukuman yang setimpal, bahkan mungkin bahkan akan dilepaskan, membuat masyarakat menggunakan cara-cara di luar hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti ini, ikatan kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat

²³ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2017", *Berita Resmi Statistik* No. 66/Th. XX, Juli 2017.

²⁴ Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang dan Ancaman Bagi Indonesia*, (66

sebagai perekat sosial menjadi hilang. Hilangnya modal sosial ini juga bisa diakibatkan oleh kesenjangan pendapatan atau tidak adilnya distribusi kekayaan antara si miskin dan si kaya. “Dari suatu sistem politik yang korup besar kemungkinan hanya akan lahir segelintir orang kaya atau pengusaha kaya yang menikmati kekayaan dari hasil korupsi.”

Kedua, hilangnya modal finansial. “Modal ini dikatakan hilang karena dikorupsi oleh pejabat yang berwenang. Modal tersebut hilang dicuri oleh para pejabat yang korup.” Dana-dana yang seharusnya seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan beralih ke kantong-kantong pribadi pejabat, sehingga pembangunan beralih dari yang seharusnya dilakukan untuk membangun fasilitas publik menjadi pembangunan fasilitas pribadi, seperti membangun rumah yang harganya miliaran rupiah. Hal ini mengakibatkan kemiskinan di masyarakat. Kualitas pendidikan menjadi rendah akibat fasilitas dan tenaga pendidik, terutama para guru, kurang mendapat jaminan sosial yang memadai sehingga mereka harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, hilangnya modal fisik. Dua akibat sebelumnya mengakibatkan hal yang ketiga ini, yaitu hilangnya modal fisik. Dampak-dampak korupsi dalam jangka panjang akan membuat sumber daya manusia

Indonesia mempunyai kualitas rendah. Indonesia juga bisa kehilangan modal sumber daya manusia yang unggul, sementara ketiadaan fisik membuat bangsa menjadi miskin secara fisik/material atau kehilangan modal fisik. Kehilangan modal fisik ini semakin diperparah oleh hilangnya sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena digunakan untuk membayar hutang yang dikorupsi. Semakin banyak hutan-hutan yang gundul sementara sumber daya alam migas juga dikuras habis untuk membayar hutang, dan bangsa ini tidak pernah tahu kapan hutang itu akan lunas.

Keempat, hilangnya modal manusia. Jika implikasi korupsi ini ditarik pada wilayah global, dalam pengertian persaingan antarnegara, maka korupsi telah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak kompetitif. Lemahnya sumber daya manusia telah membuat tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing di tingkat internasional. Akar penyebabnya adalah rendahnya subsidi pendidikan, yang sebagian besarnya tidak pernah sampai ke masyarakat karena keburu nyangkut di kantong para pejabat. Sementara itu, korupsi dalam tubuh birokrasi yang merepresentasi dalam bentuk 'sogokan' (bribery) dan 'pemerasan' (extortion), membuat Indonesia menjadi tempat yang kurang menarik bagi investor. Biaya pengurusan administrasi dan izin usaha kadang kala jauh lebih besar

dibandingkan dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III

Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga

3.1 Pengertian, Maksud dan Tujuan PAK Keluarga

Keluarga adalah “satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.”²⁵ Bungaran Antonius Simanjutak mengutip ahli sosiologi, Burgess dan Locke menuliskan, *family* atau keluarga adalah “sekelompok orang yang terikat oleh perkawinan, darah, atau adopsi, mendirikan satu rumah tangga, berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosial yang diakui, sebagai suami dan istri, ibu dan bapak, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan menciptakan kebiasaan atau kebudayaan bersama.”²⁶

Selain yang secara umum disebut *keluarga batih*, yang keanggotaanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, secara antropologis, menurut Melville J. Herskovits, juga dikenal adanya keluarga besar atau *extended family* yang terdiri dari sejumlah keluarga batih.²⁷ Keluarga besar ini juga disebut

²⁵ ‘Keluarga’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

²⁶ Bungaran Antonius Simanjutak (ed.), *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 2.

²⁷ Melville J. Herskovits, “Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat”, dalam T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 98

keluarga serumpun. Di beberapa suku di Indonesia dahulu kala, keluarga-keluarga besar hidup bersama dalam rumah-rumah besar.

Masing-masing kebudayaan memiliki pengertian yang khas dan unik mengenai keluarga. Namun, pada umumnya apa yang disebut keluarga itu menunjuk pada kelompok manusia yang terikat oleh adanya hubungan yang intim karena perkawinan. Pada keluarga-keluarga tradisional, dari keluarga batih kemudian terus berkembang menjadi keluarga besar berdasarkan pewarisan cerita silsilah. Pada masyarakat modern, hubungan intim tersebut terus berusaha dipelihara, dan bahkan kekerabatan keluarga dipahami sangat penting oleh karena modernisasi yang membawa nilai individualisme.

Keluarga, dari perspektif Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah basis dari persekutuan gereja, yang berarti termasuk di dalamnya pengajaran agama, moralitas, etika dan kesusilaan. Keluarga bagi iman Kristen pada umumnya dan terutama dalam PAK adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pengajaran mengenai Injil Kerajaan Allah. Keluarga dapat dipahami sebagai *subjek*, dalam pengertian sebagai wadah pengajaran, dan sekaligus sebagai *objek* pelaksanaan PAK secara keseluruhan oleh gereja.

Di dalam alkitab, Allah menjadi pusat dari pengetahuan. Sejak semula dalam dunia cerita Israel, yang

dapat ditemukan di kitab kejadian misalnya, pengetahuan itu adalah pemberian Allah bagi manusia. Namun, manusia diminta untuk menanggapi secara aktif (Kej 2:9, 27).²⁸

Homrighausen menuliskan, seluruh pendidikan dalam keluarga-keluarga dan komunitas Israel bersifat agama. Hal ini karena kehidupan bangsa Israel keseluruhannya dikuasai oleh agama. Agama begitu penting dalam kehidupan sosial, politik hingga penataan rumah tangga. Pendidikan dan pengajaran dimulai dari keluarga, kemudian pada kebaktian-kebaktian umum.²⁹

H. J. Schilder mengatakan, di dalam PL, taurat menjadi bahan ajar yang didiskusikan dengan pelajaran kebijaksanaan. "Taurat" adalah "penunjuk jalan". Ia berisi tentang kehendak Allah untuk menjadi semacam pedoman dalam bertindak.³⁰ Kitab Kejadian menegaskan hal itu. Kel 24:12 menuliskan, "Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, 'Datanglah kepada-Ku di atas gunung. Di situ akan Kuberikan kepadamu dua batu yang Kutulisi dengan semua

²⁸ Djoys Anneke Rantung, *Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 6, 7.

²⁹ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 4.

³⁰ H. J. Schilder, *Education and Upbringing in the Old Testament*, dalam The Interleague Publication Board. Vol. 1 Sept 1970 No. 1 and Vol. 1 Nov. 1970 No. 2, dipublikasikan di <http://spindlegroups.com/library/ilpb/education.htm>.

hukum-Ku. Semua hukum itu Kuberikan untuk pengajaran bagi bangsa itu.”

Homrighausen mengatakan, “tujuan pengajaran Yesus itu bukanlah untuk membahas berbagai pokok agama dan susila secara ilmiah atau secara teori saja, melainkan untuk melayani tiap manusia yang datang kepada-Nya. Setiap orang itu dikenal-Nya, dan dipahami-Nya masalah yang dipergumulkan orang itu.”³¹

Buku Robert Richard Boehlke *Sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen* memberi gambaran tentang PAK dalam gereja. Boehlke dalam bukunya memang mengkaji PAK dalam Gereja secara historis, namun daripadanya dapat ditemukan hal-hal yang berkenaan, baik relasi maupun pentingnya PAK dalam gereja ata kekristenan. Dalam beberapa bab bukunya itu, Boehlke membahas tentang pendidikan secara umum, yang dengannya dapat dimengerti bahwa, PAK sebenarnya adalah bagian dari pendidikan atau pengajaran pengetahuan. Dengan “agama Kristen” yang ditulis setelah ‘pendidikan’ maka ia mau menunjukkan kekhasan dari PAK itu sendiri dalam relasinya dengan pendidikan pengetahuan yang lain.

Dalam perkembangannya, PAK di dalam gereja identik dengan sekolah minggu, pendidikan agama kristen

³¹ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 6

di sekolah-sekolah dan ketekisasi, dan hal yang sudah pasti juga bahwa PAK merupakan tanggung jawab setiap keluarga/komunitas kristen. PAK merupakan bidang tanggung jawab pelayanan yang sangat penting di dalam gereja. Dalam sejarahnya, PAK di dalam gereja tidak lepas dari sejarah dimulainya sekolah minggu yang dimulai oleh Robert Raikes pada tahun 1780 di Glouster, Inggris. Menurut Clement Suleeman, sejarah dimulainya sekolah minggu itu merupakan perkembangan yang cukup penting bagi perkembangan dunia PAK.³²

PAK bagi gereja, bukan hanya sekadar sarana tapi juga paradigma dan metode. PAK mencakup totalitas dari pelayanan gereja itu sendiri. Dengan teladan orang-orang Kristen dalam kehidupan bersama orang-orang lain di ruang publik, itu juga sudah merupakan ‘pengajaran’ mengenai nilai-nilai Kristen. Namun, sebagai sebuah pendidikan PAK memang adalah program, aktivitas dan pelayanan yang terencana, seperti halnya pendidikan pada umumnya. Ia mencakup paradigma, metode, kurikulum dan sumber daya manusianya.

³² Clement Suleeman, “Pendidikan Agama Kristen dan Pembinaan Warga Gereja, Orasi Dies Natalis STT Jakarta 1980” dalam Andar Ismail (ed.), *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 5.

Melalui PAK gereja mendidik umatnya tentang kasih Allah, tentang etika, moral dan kepedulian gereja di dalam dunia. Gereja yang dimaksud di sini tentu terutama bukan hanya gedung dan institusinya, tapi sebuah persekutuan orang-orang percaya yang karena kepercayaan itu, umat memiliki tanggung jawab dan mestinya komitmen untuk melaksanakan misi Allah. PAK secara terus menerus, dengan program yang terencana mengajarkan umat mengenai misi Allah itu, prinsip dan nilainya serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan bersama orang lain di dunia ini.

Di sekolah minggu, misalnya secara praktis dan sederhana anak-anak Kristen diajarkan tentang cerita-cerita Alkitab yang mengandung makna-makna teologis, tentang etika dan moral kristiani, dan bagaimana mereka disiapkan untuk memahami semua itu dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan katekisasi pada semua tingkatan umur, umat diajarkan tentang alkitab, ajaran-ajaran gereja, kehidupan beriman orang-orang Kristen dalam keseharian di keluarga dan masyarakat hingga dalam kehidupan-kehidupan formal di tempat kerja misalnya. Diajarkan pula tentang arti baptisan, perjamuan kudus dan perayaan-perayaan gerejawi, makna gereja, dlsb. Di sekolah-sekolah, PAK adalah tentang pengajaran formal mengenai cara dan upaya memahami Alkitab, dasar-dasar ajaran Kristen, sejarah

gereja, etika dan relasi antara iman kristen dan kehidupan praksis.

Meski dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode pendidikan umum, namun gereja mestinya menghayati PAK itu melampaui pendidikan pada umumnya. PAK digerakkan oleh Allah, sebagaimana orang-orang Kristen dan gereja menghayati kuasa Allah pada dirinya. E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar dalam buku klasik mereka, "PAK itu bukan ciptaan pikiran kita sendiri, melainkan yang mendorong kita untuk melaksanakan pekerjaan itu ialah tenaga pendorong dari luar, yang masuk ke dalam hidup kita dan kini berkuasa atas kita."³³

Tugas gereja untuk mengerti perbuatan-perbuatan Allah melalui PAK pertama-tama adalah sebagai jawaban iman, sebagaimana juga ketika kita mau mengerti gereja itu. Dengan demikian, PAK dipahami sebagai mandat atau tugas gereja untuk misi Allah. Dengan demikian, PAK setidaknya memiliki tugas penting bagi dunia, yaitu untuk mencerdaskan dan kedua membedakannya dengan kebanyakan jenis pendidikan adalah suatu upaya untuk memperkenalkan kebenaran Allah.

PAK menghubungkan gereja dengan kehidupan nyata umat dan masyarakatnya dengan pengetahuan kebenaran

³³ E.G. Homrighausen, I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 10, 11.

Allah. Pengajaran iman Kristen kepada umat membuat gereja dapat memiliki pengetahuan-pengetahuan yang benar untuk mengerti dinamika perkembangan kehidupan yang sekaligus membawa umat kepada kepedulian dan kesadaran penuh atas tanggung jawabnya.

Andar Ismail membahas hubungan antara kemampuan dan ketrampilan mengajar atau didaktik dengan PAK. Sudah jelas sebenarnya, bahwa didaktik hanyalah salah satu bagian dari pendidikan dan pedagogi atau ilmu pendidikan. Tapi kemampuan didaktis sentral dalam PAK. "Didaktik adalah ilmu mengajar yang membuat jadi belajar."³⁴ Menarik definisi yang dirumuskan oleh Ismail tersebut ketika dihubungkan dengan PAK. Di dalam PAK, 'mengajar' tidak terutama agar peserta didik, pelajar 'menjadi tahu' secara harafiah, menghafal ayat-ayat alkitab, nama-nama tokoh gereja, peristiwa dan tahun-tahun dalam sejarah gereja, definisi istilah-istilah teknis melainkan membantu peserta didik agar dapat didorong dan dibantu untuk belajar. Artinya, PAK dapat berfungsi orang untuk secara kreatif, mandiri/otonom dan partisipatif untuk menemukan kebenaran. Hal mengajar yang penting dalam PAK itu seharusnya dapat membantu orang-orang Kristen untuk aktif menemukan kebenaran itu.

³⁴ Andar Ismail, "Didaktik dalam Pendidikan Agama Kristen" dalam 89.

Dari pemahaman missiologis, gereja itu berdiri, hadir dan mengada karena misi. Matius 28:19, 20: "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

PAK dengan fungsi pentingnya mengajar menjadi bagian integral dari pengutusan itu, yang demikian dipahami bahwa itu juga menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dengan keberadaan gereja. Maka, PAK adalah juga bagian dari misi Allah yang wajib dilaksanakan oleh gereja di segala abad dan tempat. Sebagai bagian dari misi Allah, PAK mengajarkan mengenai nilai-nilai Injil Kerajaan Allah untuk mencapai visi damai sejahtera atau syalom.

Dari pemahaman ini, maka PAK adalah sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan gereja. Bersamaan dengan itu, maka PAK semestinya tidak menjadi sesuatu yang eksklusif di dalam institusi gereja, tetapi harus menjadi misi dan agenda pelayanan gereja untuk konteks di mana dia hadir dan untuk dunia yang majemuk.

Dengan demikian, PAK harus selalu terbuka untuk didiskusikan dengan perubahan-perubahan pemikiran tradisi dan gaya hidup yang terjadi di dalam gereja dan masyarakat.

PAK Keluarga adalah sebuah proses pengajaran dan pendidikan tentang Injil Kerajaan Allah yang terjadi di dalam keluarga. PAK Keluarga terkait erat dengan PAK Orang Dewasa, yaitu pengajaran oleh gereja kepada ayah, ibu, dan anggota keluarga yang sudah dewasa. Tentu prosesnya terjadi secara berkesinambungan dengan metode yang beragam.

Menurut Andar Ismail, pendidikan di Gereja Purba Pertama dan Purba, serta pendidikan agama Yahudi yang menjadi cikal bakal bagi PAK masa kini, semuanya pertama-tama diarahkan kepada orang dewasa.

Agaknya pilihan arah tersebut dibuat atas dasar strategis. Strategi yang menonjol adalah karena kebanyakan orang dewasa adalah orang tua di keluarga. Jadi, dengan mendidik orang dewasa sekaligus kita mendidik anak kecil. Mendidik orang dewasa berarti mendidik pengajar dalam keluarga.³⁵

Rumah tangga atau keluarga Kristen sangat penting dalam pengajaran nilai-nilai Kristiani. Menurut Homrighausen dan Enklaar, "Rumah-tanggalah yang dapat

³⁵ Andar Ismail, "Sebuah Teologi untuk Pendidikan Agama Kristen Orang Dewasa" dalam Andar Ismail (ed.), *Mulai dari Musa dan Segala Nabi. Begining with Moses and All the Prophets*

menanamkan dalam batin anak-anak muda pengertian akan dua hal yang merupakan inti-sati pengajaran agama Kristen, yakni apakah taurat dan anugerah.”³⁶ Sebagai persekutuan yang membentuk masyarakat, rumah tangga atau keluarga juga sebagai basis dari persekutuan Kristiani. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara gereja sebagai persekutuan dengan keluarga-keluarga yang merupakan unit terkecil.

Peran keluarga dalam PAK menurut Homrighausen dan Enklaar sangatlah penting. Secara teologis dipahami bahwa keluarga Kristen adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai harganya.³⁷ Alkitab mengisahkan kehidupan keluarga-keluarga sebagai basis kehidupan keagamaan, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.

Dengan demikian, maksud PAK Keluarga adalah sebagai *upaya gereja untuk mengusahakan pengajaran mengenai Injil Kerajaan Allah dan implementasi praktisnya dalam kehidupan nyata yang menjangkau unit terkecil namun akrab dan intim, yaitu keluarga yang kemudian menjadikan persekutuan keluarga itu sebagai wadah pengajaran dan penanaman nilai kristiani*. Demikianlah sehingga setiap warga gereja dewasa yang di keluarga mereka adalah ayah, ibu, kakek dan nenek

³⁶ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 124.

³⁷ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 128.

memiliki tugas menjadi pengajar. Dalam tradisi gereja-gereja Protestan di Indonesia, apa yang disebut 'sidi jemaat' menunjuk pada pemberian dan penerimaan menjalankan fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat.

3.2 Hakikat PAK Keluarga

3.2.1 Konsep Keluarga dalam Pandangan Alkitab

Kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian satu kesatuan dengan pengesahan relasi intim yang jelas mengarah ke konsep keluarga (lihat Kej. 1:26-30). Jika dipahami secara cermat, teks ini selain berbicara tentang relasi intim dan akrab antara laki-laki dan perempuan, juga memberi signal mengenai relasi mereka dengan dunia yang lebih luas bersama ciptaan lainnya. Dengan teks tersebut, kita seolah-olah diarahkan untuk memahami, bahwa secara teologis keluarga adalah 'anugerah' Allah yang memiliki dimensi sosial dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama.

Alkitab Perjanjian Lama menyebutkan keluarga sebagai unit-unit yang beribadah kepada keluarga. Misalnya di dalam kitab Keluaran, sebagai persiapan untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir, keluarga-keluarga Israel diwajibkan oleh Allah untuk menyiapkan seekor domba untuk disembelih dalam ritual Paskah. (Kel. 12).

Disebutkan juga dalam teks itu bahwa, setiap keluarga atau rumah tangga adalah bagian dari kaum.

Keluarga juga menjadi basis untuk membangun relasi intim dengan Tuhan Allah. Keluarga Harun dalam kitab Imamat 16 memberikan korban bakaran lembu jantan untuk mengadakan perdamaian bagi dirinya dan juga keluarganya. Pada teks ini, keluarga disebutkan sebagai bagian dari jemaah Israel. Artinya, keluarga adalah unit-unit keagamaan yang penting.

Oleh karena keluarga adalah unit-unit keagamaan bagi bangsa Israel, maka setiap keluarga diberi ketetapan dan hukum moral. Kitab Ulangan 25: 5 dan 29: 18 disebutkan mengenai aturan-aturan moral tersebut yang berlaku antar sesama anggota keluarga. Relasi antara anggota keluarga diatur sedemikian rupa sehingga senantiasa mencerminkan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Allah.

Keluarga-keluarga Israel adalah basis dari kehidupan keagamaan, yang demikian juga adalah pusat dari pengajaran dan teladan moral. Hukum Tuhan, kebijakan dan nubuatan para nabi diajarkan siang dan malam oleh orang tua kepada anak-anaknya demi kehidupan yang lestari dan sejahtera. Kita Ulangan pasal 4 ayat 40 menuliskan: “Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,

supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk selamanya."

Di dalam alkitab Perjanjian Baru, keluarga ideal tentu adalah keluarga Yesus dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Maria terutama telah memberikan teladan kehambaan dan kesetiaan seorang ibu pada ketetapan dan pemilihan Allah. Sebagai manusia, Yesus adalah bagian dari keluarga ini. Yesus lahir dan di masa kanak-kanak bertumbuh dalam keluarga yang dipilih oleh Allah.

Namun, dalam kitab-kitab Paulus, konsep keluarga telah dikembangkan menjadi luas dalam pemahaman teologis. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyebutkan setiap orang percaya adalah "sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah" (Ef. 2:19; lihat juga I Tim. 3:15). Keluarga-keluarga Israel dibangun di atas pondasi ketetapan-ketetapan Allah, 'keluarga Allah' ini "dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." (ay. 20).

Dengan demikian, keluarga-keluarga Kristen oleh Paulus diberi penekanan khusus, yaitu keteladanan. Injil yang dikabarkan oleh jemaat sebagai persekutuan orang-orang percaya dimulai dari keteladanan keluarga (lihat I Tim. 3:4, 5, 12; 5:4).

3.2.2 Bentuk dan Dimensi-Dimensi Keluarga

Para sosiolog dan antropolog mengklasifikasi bentuk keluarga secara umum ke dalam dua bentuk, yaitu *keluarga inti* (*nuclear family*) dan *keluarga besar* (*extended family*). Definisi keluarga antara lain, disebutkan, “sekelompok orang yang terikat oleh perkawinan, darah, atau adopsi, mendirikan satu rumah tangga, berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosial yang diakui, sebagai suami dan istri, ibu dan bapak, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan menciptakan kebiasaan atau kebudayaan bersama.”³⁸

Selain yang secara umum disebut *keluarga batih*, yang keanggotaanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah, secara antropologis juga dikenal adanya keluarga besar atau *extended family* yang terdiri dari sejumlah keluarga batih.³⁹ Keluarga besar ini juga disebut *keluarga serumpun*. Di beberapa suku di Indonesia dahulu kala, keluarga-keluarga besar hidup bersama dalam rumah-rumah besar.

³⁸ Bungaran Antonius Simanjutak (ed.), *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 2.

³⁹ Melville J. Herskovits, “Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat”, dalam T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 98

Bentuk keluarga yang disebutkan dalam buku ini mengikuti bentuk-bentuk keluarga yang umum di Indonesia. Secara umum, keluarga terbentuk oleh adanya relasi kawin-mawin yang membentuk hubungan atau pertalian darah. Di kebanyakan suku, biasanya ikatan antara anggota dihubungkan dengan adanya hubungan silsilah yang ditarik dari kisah asal-usul. Sebuah suku diikat oleh adanya mitos bahwa mereka keturunan dari satu nenek moyang atau leluhur. Jika mengacu dari pengertian ini, maka suku adalah 'keluarga besar'.

Keluarga-keluarga dalam masyarakat modern tidak lagi homogen dari segi kekerabatan silsilah. Keluarga batih/inti biasanya tidak langsung memiliki hubungan darah dengan tetangganya. Sebuah keluarga batih bisa bagian dari sebuah masyarakat yang terdiri dari banyak keluarga batih yang berasal dari keluarga besar atau suku yang berbeda. Namun, pada banyak kasus, keluarga-keluarga batih yang berasal dari keluarga besar yang berbeda oleh perkawinan anak-nak mereka maka akan terbentuk relasi baru keluarga besar yang mungkin dapat disebut tipe modern dari apa yang disebut *extended family*.

Dalam hal relasi dan komunikasi serta penanaman nilai di dalam keluarga batih, faktor ruang dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sangatlah menentukan. Pada masyarakat modern di mana ruang

hidup dipenuhi dengan berbagai macam perubahan, maka relasi dan komunikasi antara suami dan istri dan anak-anak bagi yang sudah punya anak berhadapan dengan tuntutan kerja, karir dan pemenuhan kebutuhan. Banyak keluarga, istri dan suami bekerja di luar rumah. Keluarga yang memiliki anak, akan lebih banyak waktu dengan pengasuh sewaan. Gaya hidup modern sangat mempengaruhi kualitas keluarga dalam hal relasi dan komunikasi serta nilai-nilai yang dianut.

Keluarga-keluarga dalam masyarakat modern, baik yang berbentuk batih maupun keluarga besar, terutama mereka bukan lagi bagian dari *komunitas* atau *penguyuban*, dalam kehidupan suku, melainkan kelompok terkecil dalam masyarakat dan negara yang memiliki dimensi sosial, agamis, ekonomis dan politis.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang heterogen. Nilai-nilai serta tatacara kehidupan masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dipertimbangkan oleh keluarga. Keluarga memiliki kewajiban-kewajiban sosial, seperti keterlibatan dalam kegiatan desa, keluarga, RT dan RW, istri-istri dalam PKK. Beberapa kegiatan sosial informal, seperti arisan, acara bersama berdasarkan hobi, anak-anak bermain dengan anak-anak tetangga atau sekompleks, dll.

Dimensi agamis pada keluarga yaitu keanggotaan dan keterlibatan aktif serta keyakinan yang dianut berdasarkan agama yang dipilih atau diwariskan. Keluarga-keluarga di Indonesia adalah juga umat beragama pada agama-agama yang ada. Dimensi agamis ini mempengaruhi relasi antar keluarga. Agama pada kenyataannya menyatukan individu atau keluarga-keluarga yang berbeda asal suku dan ras serta golongan yang membentuk satu kelompok berdasarkan kategori agama.

Dimensi ekonomis keluarga terkait dengan hakekat setiap individu sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Keluarga yang terdiri dari beberapa individu memiliki dorongan-dorongan atau kepentingan-kepentingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam hal sandang, pangan dan papan. Maka, salah satunya, suami atau istri, atau kedua-duanya bekerja untuk mendapatkan upah. Bersamaan dengan itu, keluarga adalah juga kelompok konsumen.

Dalam dimensi politisnya, setiap keluarga terdiri dari individu-individu yang adalah warga negara dengan hak dan kewajiban-kewajiban politis yang melekat padanya. Keluarga adalah institusi terkecil dalam sebuah negara yang harus dicatat dalam data statistik demografis.

Deskripsi mengenai bentuk dan dimensi-dimensi tersebut mengantar kita kepada pengertian bahwa keluarga

adalah subjek dan sekaligus objek. Sebagai subjek keluarga itu adalah sebuah institusi kekerabatan berdasarkan pertalian darah. Sebagai objek, dia adalah anggota dari institusi-institusi sosial, seperti masyarakat dan politik yaitu negara.

Bentuk dan dimensi-dimensi pada keluarga ini banyak di antaranya universal, namun apa yang saya paparkan ini terutama mengacu dari pengertian keluarga di Indonesia. Di negara-negara lain yang sekuler, keluarga bisa saja tidak memiliki dimensi agamis, misalnya. Demikian juga bentuk keluarga besar, arti dan makna relasi antara anggotanya di negara-negara modern lainnya, dapat saja tidak sekuat keluarga-keluarga di negara-negara yang kebudayaannya memelihara tradisi silsilah keluarga.

3.2.3 Manusia Sebagai Mahkluk Sosial

Mengikuti hakekat setiap individu/manusia sebagai makhluk sosial, keluarga juga demikian. Sudah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa keluarga memiliki dimensi sosial yang tidak lepas dari kewajiban-kewajiban dalam masyarakat.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan negara. Di dalam masyarakat keluarga berelasi secara sosial dengan keluarga-keluarga lain, dengan institusi sosial dan dengan komunitas-komunitas tertentu yang terhubung dengan

mereka, baik secara identitas, afiliasi minat dan lain sebagainya.

Di dalam setiap keluarga terdapat individu-individu sebagai anggotanya. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak juga lansia hidup serumah dan membentuk sebuah persekutuan keluarga. Generasi yang lahir dari keluarga-keluarga ini diwariskan nilai-nilai, etika, moral dan paham-paham tertentu yang dianut secara turun-temurun. Namun terutama nilai-nilai keagamaan, pertama-tama ditanamkan di dalam keluarga.

Individu-individu ini, katakanlah mereka anak-anak keluarga tersebut, tentu tidak akan tinggal tetap bersama keluarga utama. Mereka akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bahkan ketika dewasa mereka merantau dan membentuk keluarga. Nilai-nilai yang diwariskan dari keluarga utama tentu menjadi modal moral dan etika. Namun, dari sosialisasi, relasi, interaksi dan keterlibatan dengan dunia luar rumah, generasi ini juga menerima dan berdinamika dengan nilai-nilai yang berkembang di komunitas atau tempat mereka hidup.

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial akan terus mengembangkan dirinya. Nilai-nilai yang telah terinternalisasi dari sejak kecil di dalam keluarga utama akan berjumpa dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagai makhluk sosial adalah suatu

keniscayaan jika seorang individu menerima dan mengembangkan nilai-nilai baru di dalam dirinya atau keluarga yang dia bentuk. Namun, secara teologis nilai-nilai apapu dan dari manapun asalnya, mestinya selalu dipagari oleh spiritualitas yang menghidupkan, yaitu nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketulusan.

3.2.4 Keluarga Kristen sebagai *Home Based Pendidikan Kristiani*

Keluarga memiliki peran besar dalam perkembangan agama Kristen. Pada abad pertama, agama Kristen berkembang dan dikembangkan melalui perkumpulan rumah tangga. Gedung gereja waktu itu belum ada. Orang-orang Kristen berkumpul di rumah-rumah. Kumpulan itu disebut 'jemaat di rumah'. Seperti misalnya dapat kita baca pada Roma 16:5; I Korintus 16:19; Kolose 4:15; dan Filemon 2.⁴⁰

'Jemaat di rumah' ini, menurut Andar Ismail, seperti yang disebutkan pada Kisah Rasul 2, adalah sebuah 'ikatan persaudaraan yang saling tolong menolong', kelompok yang 'mempelajari ajaran para rasul', kelompok yang berdoa dan makan bersama. Jadi, mereka ini adalah

⁴⁰ Andar Ismail, *Selamat Ribut Rukun!*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 83

persekutuan 'berdoa' dan 'belajar'.⁴¹ Dengan demikian, sudah dari awal, keluarga atau persekutuan rumah tangga adalah komunitas belajar, Andar Ismail menyebutnya 'keluarga sebagai kelas katekese'.

Makanya, dalam teori PAK, keluarga disebut sebagai *home based* pendidikan kristiani. Kedudukan keluarga dalam PAK ini terkait dengan arti keluarga itu sendiri. Menurut Homrighausen dan Enklaar, "Keluarga itu suatu persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang saling terikat oleh ikatan darah dan perhubungan sosial yang paling rapat."⁴²

Pendidikan, pengajaran dan penanaman nilai kristiani pertama-tama mestinya terjadi di dalam sebuah kelompok persekutuan yang intim yang mewarisi dan meyakini nilai-nilai Kristen dalam kehidupannya, yaitu *keluarga* atau *rumah tangga Kristen*. Setiap individu lahir dan bertumbuh utamanya dimulai dari satuan terkecil ini, yaitu keluarga. Dengan demikian, sebelum ke lingkungan yang luas dan ke institusi pendidikan formal, anak-anak atau setiap individu sudah menjalani proses pendidikan atau pengajaran dengan cara yang khas di keluarganya masing-masing.

⁴¹ Ismail, *Selamat Ribut*

⁴² Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 128.

Dari deskripsi di atas semakin menjadi jelas bahwa keluarga adalah basis atau unsur penting dalam pendidikan kristiani. Keluarga yang dapat menjalankan pendidikan kristiani sudah pasti adalah warga gereja yang menerima PAK dari gereja. Sehingga, ketika kita berbicara PAK Keluarga, maka sekaligus menunjuk pada peran dan fungsi gereja yang melangsungkan PAK.

Hubungan antara institusi keluarga dengan gereja terjadi secara timbal balik dalam proses yang terus berlangsung. Suami dan istri yang adalah warga gereja, semasa anak-anak adalah anggota keluarga Kristen. Mereka mengikuti Sekolah Minggu yang diselenggarakan oleh gereja sambil mendapat pengajaran dari ayah dan ibu mereka. Ketika beranjak remaja dan pemuda, PAK Keluarga terus berlangsung, mereka juga adalah warga gereja yang memperoleh PAK langsung dari gereja atau lebih khusus mengikuti katekisasi untuk persiapan menerima pelayanan sidi jemaat.

Ketika sudah disidipun, selagi belum menikah, mereka masih saja memperoleh pengajaran keagamaan dari ayah atau ibu. Ketika membentuk rumah tangga, maka mereka akan bertanggung jawab pada penyelenggaraan PAK di keluarga mereka yang isi pengajarannya bersumber dari nilai dan teladan kristiani keluarga asal namun juga sudah pasti dari gereja. Pada kebanyakan gereja Prostestan,

setiap warga gereja yang sudah disidi oleh gereja diberi tanggung jawab untuk ikut melaksanakan penyelenggaraan PAK gereja melalui keterlibatan pada beberapa cara.

Penjelasan di atas memberi gambaran kepada kita, bahwa keluarga adalah basis dari proses timbal balik penyelenggaraan PAK. Lebih jelas mengenai penjelasan tersebut, bahwa gereja sebagai persekutuan, di dalamnya terdapat orang-orang percaya, mereka adalah individu-individu yang lahir dan bertumbuh dalam keluarga.

Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa PAK adalah sebuah 'gerakan' bersama orang-orang percaya. Menurut Groome:

“Pendidikan agama Kristen adalah kegiatan politis bersama para peziarah dalam waktu yang secara sengaja bersama mereka memberi perhatian pada kegiatan Allah di masa kini kita, pada cerita komunitas iman Kristen, dan visi Kerajaan Allah, benih-benih yang telah hadir di antara kita.”⁴³

⁴³ Thomas H. Groome, *Christian Religious Education: Pendidikan Agama Kristen: Berbagi Cerita dan Visi Kita*, cetak I 1980, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 37.

Definisi Groome tersebut memberi perhatian kepada orang-orang percaya atau 'para peziarah'. Bolehlah kita katakan, bahwa 'keluarga Kristen' adalah pula 'peziarah' itu. Keluarga-keluarga Kristen inilah yang berhimpun di dalam gereja. Andar Ismail, bahkan menegaskan, bahwa wadah utama dari PAK adalah keluarga, bukan gereja. Waktu anak-anak kebanyakan bersama keluarganya, ayah dan ibunya. "Karena itu, pendidikan anak-anak sebenarnya perlu dimulai dengan pendidikan orang tua."⁴⁴ Penegasan Ismail ini makin memperkuat pemahaman kita, bahwa keluarga adalah basis PAK yang terhubung secara timbal balik dengan gereja.

⁴⁴ Ismail, Ismail, *Selamat Ribut*, 85.

Bab IV

Peran Keluarga Kristen sebagai Lingkungan Edukasi Anti Korupsi

4.1 Pemahaman, Fungsi dan Peran Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I pasal 1:10 menyebutkan: “Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian tersebut kita mendapat pemahaman mengenai keluarga berkualitas menurut negara, yaitu: 1. Dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah; 2. Sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis; 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah ‘aspek legalitas, kualitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kerohanian. Artinya, keluarga yang berkualitas harus memenuhi aspek-aspek yang holistik, yaitu jasmani dan rohani.

Pembangunan keluarga, menurut UU tersebut, seperti yang disebutkan pada Bab II, bagian Ketiga Pasal 4: 2,

“...bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”

Pendapat lain menyebutkan, tujuan keluarga adalah sebagai suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya dan untuk memelihara masyarakat yang lebih luas.⁴⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan delapan fungsi keluarga, yaitu:

- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi melindungi;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g. fungsi ekonomi;
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

⁴⁵ Herien Puspitawati, “Konsep dan Teori Keluarga”, <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf>

Pada pasal 6 PP tersebut disebutkan: “Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.”

Bagian penjelasan PP tersebut untuk fungsi keluarga menyebutkan:

- Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

- Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
- Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
- Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
- Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Menurut *United Nations*, fungsi keluarga adalah: *establishing emotional, economic and social bonds between spouses; providing a framework for procreation and sexual relations between spouses; protecting family members; giving a name and status to family members, especially to children; and providing basic care, socialization and education of children* (membangun ikatan emosional, ekonomi dan sosial antar pasangan; menyediakan kerangka kerja untuk prokreasi dan

hubungan seksual antar pasangan; melindungi anggota keluarga; memberi nama dan status kepada anggota keluarga, terutama kepada anak-anak; dan memberikan perawatan dasar, sosialisasi dan edukasi anak).⁴⁶

Alkitab sendiri, terutama pada Perjanjian Lama, fungsi keluarga disebutkan pertama-tama disebutkan pada Kitab Kejadian 1:28: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Fungsi prokreasi rupanya universal. Lalu secara khusus disebutkan tentang fungsi membangun kehidupan bersama, dan tanggung jawab mengelolah alam sebagai ciptaan Tuhan pula.

Fungsi lain adalah 'menjadi berkat' seperti yang dimanatkan oleh Allah kepada keluarga Abram (Kej. 12). Keluarga Abram menjadi prototipe bangsa Israel yang juga diperintah oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di Perjanjian Baru, kita menemukan perintah dari Yesus kepada murid-murid-Nya untuk juga menjadi berkat bagi dunia. Matius 28:19, 20 menyebutkan: "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan

⁴⁶ *United Nations*, "The Family, its Roles, Composition and Structure",
<http://www.un.org/popin/icpd/prepcomm/official/rap/RAP4.html>

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Dari deskripsi berdasarkan perspektif yang beragam tersebut, kita mendapati fungsi keluarga yang multidimensi. Selain fungsi prokreasi, ekonomis yang bertujuan untuk kesejahteraan jasmani dan rohani, fungsi edukasi dan keagamaan ternyata adalah penting dan bahkan mendasar. Hal lain, bahwa keluarga dengan dimensi sosialnya adalah institusi dasar atau inti masyarakat yang terhubung dengan kewajiban-kewajiban sosialnya.

4.2 Membangun dan Mengembangkan Karakter Kristiani dalam Keluarga

Saya telah mengulas pada bagian sebelumnya, bahwa keluarga adalah basis pendidikan kristiani. Itu sekaligus juga hendak mau menegaskan bahwa keluarga adalah basis atau bahkan pusat pengembangan karakter kristiani. Namun, di era modern sekarang ini, hal tersebut tidaklah mudah. Banyak fakta enunjukkan keluarga-keluarga menjadi berantakan, anak-anak terlantar karena orang tua sibuk bekerja atau bahkan karena perceraian. Dalam situasi

seperti ini, pengembangan karakter kristiani dalam keluarga mendapat tantangan hebat.

Situasi keluarga yang demikian, sebelumnya banyak terjadi di Barat atau di negara-negara modern lainnya. Namun, di Indonesia akhir-akhir ini situasi tersebut rupanya sedang mewabah pula. Keluarga-keluarga Kristen di Indonesia juga mengalami demikian. Suami dan istri bercerai; kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi; anak-anak kehilangan kasih sayang yang membuat mereka mencari cara berekspresi yang berbahaya seperti narkoba dan alkohol. Pada beberapa kasus, keluarga Kristen birokrat atau politisi, suami atau istri terjerat kasus korupsi. Anak-anak terlantar dan kehilangan pegangan moral dan etika.

Menurut Andar Ismail, untuk mendidik anak-anak secara kristiani, maka yang pertama-tama memperoleh pendidikan tersebut adalah orang tua. Artinya, sebagai pengajar PAK di dalam keluarga, orang tua haruslah pertama-tama yang memiliki pemahaman dan wawasan yang luas dan dalam mengenai nilai-nilai kristiani. Jika orang tua justru bermasalah dalam hal tersebut, maka otomatis akan bermasalah pula anak-anak mereka dalam hal penanaman nilai-nilai Kristiani tersebut.

Menurut Maurice Eminyan, SJ, "Keluarga adalah suatu Komunitas Cinta Kasih, Hidup dan Keselamatan".⁴⁷ Definisi ini, menurut pendapat saya bukan hanya perspektif Katolik, tapi juga berlaku untuk Kristen Protestan. Sebagai komunitas cinta kasih, hidup dan keselamatan, maka keluarga idealnya adalah basis dari penanaman nilai dan pembentukan karakter Kristiani.

Apa karakter kristiani itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan 'karakter' sebagai "tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak dan kepribadian." Dengan demikian, karakter kristiani adalah tabiat, sifat, watak dan kepribadian yang bercirikan nilai-nilai Kristiani.⁴⁸

Nilai Kristiani yang utama menurut alkitab, adalah 'Kasih'. Kata Yesus: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu

⁴⁷ Maurice Eminyan, SJ, *Teologi Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 20.

⁴⁸ Pembahasan mengenai pengertian karakter dan pendidikan karakter lihat pembahasan Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2007).

sendiri” (Mat. 22:37-39). Nilai ini oleh gereja selalu diajarkan untuk menjadi dasar karakter atau kepribadian setiap orang Kristen dalam kehadirannya bersama dengan orang lain di dalam kehidupan.

Nilai dasar itu memberi kita pemahaman, bahwa sebagai orang percaya iman adalah kepercayaan dan sikap mengasihi Tuhan Allah secara penuh. Iman tersebut kemudian menjadi dasar pula dalam menjalani relasi dengan sesama, yaitu mengasihi dengan sepenuh hati pula.

“Mengasihi Tuhan Allah dan sesama’ oleh alkitab disebut sebagai ‘hukum’. Namun, pengertiannya berbeda dengan hukum positif atau aturan yang dibuat oleh manusia lainnya. Hukum di sini dalam arti ‘perintah Allah’ atau ‘amanat dari Allah’. Dengan demikian, nilai dasar Kristiani diterjemahkan dalam bentuk karakter, watak, kepribadian, sikap dan cara hidup, hendaknya dimengerti bahwa beriman kepada Allah dan mengasihi bukan karena mengharap balasan atau hadiah melainkan karena sebagai orang percaya, hal tersebut adalah kewajiban iman.

Nilai dasar Kristiani ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan:

1. Mengasihi Tuhan Allah berarti menautkan seluruh kehidupan kepada-Nya. Hal ini terkait dengan pengakuan iman kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara dan pemilik kehidupan. Dengan

demikian, maka orang percaya mestinya dapat mengatasi *egoisme* pada dirinya, misalnya sikap yang mencari untung sendiri dari kesusahan orang banyak, seperti perilaku korupsi.

2. Mengasihi Tuhan Allah berarti penerimaan terhadap segala ajaran dan perintah-Nya untuk tidak melakukan kejahatan atau keberdosaan. Hidup suci dan kudus jelas adalah wujud dari mengasihi Tuhan Allah
3. Mengasihi sesama manusia berarti memandang orang lain sebagai sesama ciptaan yang Tuhan Allah. Maksudnya, karakter yang mestinya terbentuk pada setiap orang percaya adalah motivasi hidup untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dalam terang iman kepada Allah.
4. Mengasihi sesama manusia sekaligus refleksi dari mengasihi diri sendiri. Dengan mengasihi diri sendiri atau sebaliknya mengasihi orang lain, maka kita telah memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri.

Menurut St. Darmawijaya, Pr, keluarga Kristen perlu terus belajar dari kehidupan keluarga-keluarga di dalam Alkitab. Antara lain dia merujuk ke keluarga Yusuf dan Maria, orang tua Yesus.

Keluarga itu hidup berkat Roh Yesus Kristus. Keluarga itu berkembang dalam kebijaksanaan dan kecerdasan-Nya. Keluarga itu merasa cemas dan kehilangan hidup tanpa Yesus Kristus. Mereka mencari, menemukan Dia tetapi juga membiatkan Dia menentukan hidup keluarga. Keluarga Nazaret sungguh merupakan keluarga yang dibentuk oleh pribadi Yesus Kristus yang hidup dalam keluarga itu. Keluarga itu pun tidak bisa hidup tanpa Yesus⁴⁹

Keluarga yang hidupnya berpaut pada Yesus Kristus adalah keluarga yang selalu terus meneladani Yesus dalam kehidupannya. Orang tua, suami dan istri menjalin relasi berdasarkan teladan Yesus yang penuh kasih. Orang tua meneladani Yesus yang rela berkorban. Anak-anak dibimbing dengan penuh kasih. Nilai-nilai kasih menjadi dasar pengajaran bagi anak-anak dan seisi rumah. Kesemuanya itu diharapkan tergambar dalam karakter dan kepribadian keluarga: ayah, ibu dan anak-anak dalam kehidupan mereka di berbagai bidang dan dimensi.

⁴⁹ St. Darmawijaya, Pr, 12 *Pola Keluarga Beriman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 132

Surat Paulus kepada Timotius bahkan menegaskan karakter keluarga Kristen dalam hubungan dengan tanggung jawab untuk melayani. Syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat atau pelayan oleh Paulus dirujuk justru dari karakter keluarga kristiani yang ideal:

Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemaarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.

Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah?

Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman Iblis.

Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis.

Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah,

melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci.

Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat.

Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal.

Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik.

Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.

Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau.

Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.

Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: "Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh;

yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan" (I Tim. 3:2-16).

Keluarga yang mengasihi, kudus dan selalu mau meneladani Yesus menjadi cermin dari 'jemaat Allah' atau 'keluarga Allah'. Dalam upaya mengembangkan dan membangun karakter kristiani dalam keluarga tersebut, maka peran gereja sangatlah penting. Melalui PAK yang dijalankan oleh gereja, berupa PAK sekolah minggu, PAK orang dewasa dan juga katekisasi, maka orang tua sebagai 'pengajar' dalam keluarga dapat memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai nilai-nilai kristiani tersebut.

Jadi, upaya pengembangan dan pembangunan karakter kristiani dalam keluarga, seperti yang sudah saya singgung pada bagian sebelumnya terhubungan secara timbal balik dengan gereja. Syarat penting dalam upaya itu adalah usaha terus menerus memantapkan iman orang tua yang menjadi pengajar dalam keluarga.

4.3 Orang Tua sebagai *Role Model* pembentukan Karakter Kristiani

Melanjutkan pembahasan di atas, maka perlu saya bahas lagi di sini mengenai peran orang tua. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bagi kebanyakan orang yang membangun rumah tangga, salah satu yang diidamkan adalah kelahiran anak-anak. Bagi keluarga yang tidak bisa mendapatkan anak sendiri karena alasan-alasan tertentu, baik secara medis maupun psikologis, keinginan itu diwujudkan dengan mengangkat anak.

Horace Bushnell, seperti yang dikutip Groome, adalah seorang teoritikus pendidikan Kristen yang telah menelorkan gagasan mengenai sosialisasi pendidikan Kristen melalui peran orang dewasa atau orang tua. Bushnell merumuskan teorinya mengenai asuhan Kristen dalam apa yang disebut istilahkan 'kesatuan organik' masyarakat. Bahwa, orang dewasa, orang tua atau masyarakat adalah teladan bagi anak-anak. Groome mengutip pendapat Bushnell yang menyebutkan, "Pertama-tama milikilah iman Kristen dalam dirimu; kemudian ajarkan iman Kristen tersebut sebagaimana kamu menghidupinya, ajarkan iman Kristen dengan

menghidupinya; karena kamu tidak dapat melakukannya dengan cara lain.”⁵⁰

Anak-anak, sejak bayi ketika belajar berbicara dia meniru orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama ibu atau ayahnya. Menurut ilmu kejiwaan, orang tua lah yang juga menstransmisi nilai-nilai dan sikap kepada anak-anak.⁵¹

Seperti pendapat Bushnell di atas, orang tua sebagai *role model* pembentukan nilai-nilai kristiani adalah orang tua yang memiliki iman yang mantap. Tidak sekadar pengetahuan dan wawasan, namun juga kecakapan dan perilaku. Kesemuanya itu menjadi modal bagi orang tua untuk menjadi teladan. Anak-anak meneladani iman orang tuanya, yang antara lain ditunjukkan dengan rajin berdoa, rajin membaca alkitab dan giat dalam persekutuan.

Jika keluarga adalah basis pendidikan dan pembentukan karakter Kristen, maka orang tua adalah teladan atau *role model* yang utama bagi anak-anaknya. Dengan demikian, PAK Dewasa yang mendidik nilai-nilai kristiani kepada orang tua yang dijalankan oleh gereja sangatlah penting. Mengulang apa yang dikatakan oleh Andar Ismail seperti yang sudah dikutip pada bagian

⁵⁰ Groome, *Christian Religious Education*, 172

⁵¹ Irving B. Weiner, Donald K. Freedheim, Richard M. Lerner (ed.), *Handbook of Psychology*, Vol. 6 *Developmental Psychology*, (New Jersey: John Wiley & Son, Inc., 2003), 253.

sebelumnya, bahwa “...pendidikan anak-anak sebenarnya perlu dimulai dengan pendidikan orang tua.”

Pendidikan tentu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik. Afektif berhubungan dengan sikap dan nilai yang mencakup watak, perilaku, perasaan, minat, sikap dan emosi. Psikomotorik berhubungan dengan kemampuan berinovasi atau ketrampilan berkreasi.⁵²

Orang tua sebagai teladan bagi anak-anaknya adalah orang tua yang memiliki pengetahuan dan wawasan; memiliki sikap dan kesadaran yang baik dan orang tua yang memiliki ketrampilan bertindak yang baik. Dari kemampuan-kemampuan yang ada pada orang tua tersebut, anak-anak belajar lewat teladan mereka. Dalam hal pendidikan antikorupsi, hal tersebut misalnya melalui teladan jujur, hidup bersahaja dan lain sebagainya.

4.4 Perilaku Antikorupsi

Di Indonesia, korupsi telah ditetapkan sebagai ‘kejahatan luar biasa’ atau *extra ordinary crime*. Reformasi yang dimulai tahun 1998 telah mengmanatkan pemberantasan korupsi. Semua institusi negara telah

⁵² Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed., *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 245.

digerakkan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Secara umum, upaya tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Berbicara perilaku anti korupsi, hal tersebut terkait erat dengan karakter dan mental setiap warga negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘perilaku’ sebagai ‘tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.’ Dengan demikian, ‘perilaku anti korupsi’ adalah sikap terhadap yang menolak melakukan praktek korupsi oleh karena baik karena moral yang dimiliki oleh individu maupun karena lingkungan yang membatasi dia melakukan hal tersebut.

Buku *Pendidikan Anti Korupsi* yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian tahun 2011 menggunakan teori *planned behavior* dalam membahas perilaku anti korupsi. Teori ini dibahas oleh Fishbein M dan Ajzein. I, berjudul *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research* (Addison-Wesley Publishing, Sydney, 1975).⁵³

⁵³ Asriana Issa Sofia, “Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi” dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi (ed.), *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 7, 8.

Mengacu dari teori tersebut, maka terdapat 3 komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu:

- a. Attitude toward behavior (ATB): yang dipengaruhi oleh *behavioral belief*, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi.
- b. Subjective norms (SN): yang dipengaruhi oleh *subjective norms* di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi.

- c. Control belief (CB): yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control*, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan di sekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi, berkisar pada *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, *control beliefs*. Tiga hal diharapkan dapat mempengaruhi perilaku. *Attitude toward behavior* berkaitan dengan nilai yang dianut seorang individu. *Subjective norms* berupa nilai yang berasal dari apakah agama atau budaya di mana si individu hidup. *Control belief* berkaitan dengan konteks yang mempengaruhi si individu dalam berperilaku.

Nilai-nilai serta konteks tersebut mempengaruhi sikap atau perilaku tersebut untuk menyatakan penolakan atau anti terhadap praktek anti korupsi. Seseorang bisa saja memiliki kesempatan melakukan korupsi karena kekuasaan

yang dimilikinya, namun karena dia menganut nilai yang membenci praktek tersebut, maka dia akan menyatakan penolakan terhadap godaan itu. Atau, sebaliknya, sistem hukum atau norma masyarakat yang anti terhadap korupsi, maka korupsi tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh setiap orang.

Dalam agama Kristen, oleh ajaran yang bersumber dari alkitab atau tradisi mengarahkan warga gereja untuk berlaku baik yaitu hidup dalam kasih, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengambil yang bukan hak milik, tidak serakah serta tidak mengutamakan kesenangan diri sendiri malahan memberi arahan untuk rela berkorban.

Perilaku hidup seorang Kristen menurut alkitab haruslah sepadan dengan imannya. Beriman kepada Allah adalah sebuah komitmen terhadap segala ajaran, amanat dan perintah-Nya untuk hanya melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Korupsi adalah praktek keberdosaan karena mengambil bukan hak milik dan mengakibatkan dampak luas bagi banyak orang. Maka, bagi seorang Kristen, perilaku hidupnya mestinya menolak praktek dosa tersebut. Dengan demikian, perilaku anti korupsi adalah juga bentuk keberiman bagi seorang Kristen dan juga setiap umat beragama.

4.5 Nilai-nilai Kristiani Antikorupsi

Buku *Pendidikan Anti Korupsi* merumuskan sembilan nilai anti korupsi.⁵⁴ Yaitu: 1. Kejujuran; 2. Kepedulian; 3. Kemandirian; 4. Kedisiplinan; 5. Tanggung Jawab; 6. Kerja keras; 7. Sederhana; 8. Keberanian; 9. Keadilan. Nilai-nilai ini tentu sejalan pula dengan nilai-nilai Kristiani. Namun, di bawah ini saya akan lebih spesifik mengulas nilai-nilai Kristiani.

Alkitab memberi kesaksian bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia untuk mengelolah berkat yang diberikan-Nya. Manusia juga diberi mandat oleh Tuhan Allah untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia bahkan dipahami sebagai hukum yang utama dan pertama. Keseluruhan kesaksian alkitab tersebut bernilai kasih.

Hukum 'jangan mencuri' diberikan oleh Allah kepada umat Israel melalui Musa sebelum mereka memasuki tanah perjanjian Kanaan (Kel. 20:15; Ul. 5:19). Korupsi sebagai tindakan berdosa, juga termasuk dalam larangan tersebut. Hukum ini mendasar sebab ia diamanatkan langsung oleh Allah kepada umat Israel untuk dipatuhi agar mereka dapat hidup dalam kesejahteraan.

⁵⁴ Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito, "Nilai dan Prinsip Anti Korupsi" dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi (ed.), *Pendidikan Anti-Korupsi*, 76-81.

Perilaku keberdosaan atau kejahatan, menurut Yesus timbul dari dalam hati atau keinginan:

"Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." (Markus 7:20-23).

Jadi nilai-nilai anti korupsi harus ditanam di dalam hati dan pikiran masing-masing orang. Nilai-nilai kristiani anti korup yang bersumber dari alkitab mesti dipahami bagian dari penghayatan keberimanan kepada Tuhan Allah.

Dari kesaksian alkitab tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa nilai Kristiani anti korupsi, yaitu:

1. *Nilai keugaharian* dalam mengelola berkat Tuhan. Tuhan Allah seperti yang disaksikan oleh alkitab memberi mandat mengenai keharusan bagi orang percaya untuk hidup dalam keugaharian atau kesederhanaan/kebersahajaan. Salah satu penyebab tindakan korupsi adalah ambisi atau keinginan untuk

kaya dan berkuasa. Alkitab dengan tegas mengingatkan bahaya hidup dalam perhambaan kepada *mamon* (Mat. 6:24; Luk. 16:13; 1 Tim. 6: 9, 10). Dengan berusaha menahan diri dari godaan kaya, maka akan terhindar upaya-upaya untuk melakukan korupsi.

2. *Nilai kerelaan berbagi dan rela berkorban* dalam rangka menjadi berkat bagi banyak orang. Kerelaan berbagi dengan orang lain adalah dalam rangka hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perilaku serakah, loba atau tamak, yaitu sikap yang selalu berharap atau menginginkan lebih dari yang sudah ada adalah salah satu penyebab korupsi. Perilaku ini berlawanan dengan salah satu prinsip Kristiani, yaitu tanggung jawab berbagi atau bahkan berkorban untuk kepentingan bersama. Dalam Lukas 12:15, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu." Sebaliknya, alkitab mengamanatkan orang-orang percaya untuk saling mengasihi.
3. *Nilai kejujuran* sangat fundamental dalam melawan korupsi. Kejujuran adalah kelurusan hati yang dalam praksis antara lain tampak dalam bentuk ketaatan

pada aturan yang berlaku. Kejujuran bagi pengamsal bahkan memiliki implikasi bagi kehidupan bersama. Pengamsal berkata: “Bila orang benar mujur, berialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya (Ams. 11: 10.11).

4. *Nilai keadilan* menjadi dasar bagi setiap orang dalam mengelola kepunyaan bersama. Keadilan menjadi nilai dasar dalam melawan korupsi karena memberi pemahaman yang kuat mengenai pentingnya mengutamakan kepentingan bersama. Sikap dan perilaku menolak korupsi adalah bentuk keadilan terhadap banyak orang. Di alkitab, nabi Amos mengecam ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Perilaku penguasa ini adalah manipulasi, korupsi dan suap.

Keempat nilai kristiani anti korupsi tersebut sesungguhnya bersumber dari nilai dasar kepercayaan Kristen, yaitu Kasih. Nilai anti korupsi keugaharian, kerelaan berbagi dan berkorban, kejujuran dan keadilan adalah implementasi dari nilai dari Kasih. Kasih tersebut adalah refleksi dari Yesus Kristus sendiri sebagai

perwujudan dari Kasih Agung Allah. Seperti yang tertulis di dalam alkitab:

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh. 3:16).

Dengan menyatakan menolak korupsi maka orang-orang Kristen sedang berusaha menghayati Kasih Allah tersebut sekaligus juga sebagai bentuk pengakuan iman kepada Yesus Kristus yang telah rela berkorban demi manusia dan dunia.

4.6 Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* menguraikan sejumlah prinsip anti korupsi.⁵⁵ Di bawah ini saya akan mengutip prinsip-prinsip tersebut yang kemudian

⁵⁵ Nanang T. Puspito, dkk, (ed.) *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), 73-86.

didiskusikan dengan prinsip-prinsip kristiani untuk PAK Keluarga.

1. Akuntabilitas

Bura dan Puspito menyebutkan, “akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.” Menurut mereka, dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Akuntabilitas dalam kelembagaan membutuhkan kejujuran dari individu yang bekerja di dalamnya. Sehingga lebih tepat dikatakan, akuntabilitas dapat terjadi jika ada kesesuaian antara aturan atau prosedur yang ditetapkan dengan moral atau nilai kejujuran kepada setiap individu yang terkait dengannya.

Pada banyak kasus, terutama di lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan, aturan dan prosedur sebenarnya sudah disusun secara baik, namun karena individu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan pada prinsipnya bermoral tidak baik, maka pelaporan dapat disiasati sedemikian rupa. Manipulasi angka dan bukti-bukti

pembelian atau belanja misalnya dapat menipu pemeriksa atau pihak yang menerima laporan.

Kejujuran sebagai sebuah nilai yang mesti berpengaruh pada perilaku adalah salah satu materi yang perlu diajarkan mulai dari dalam keluarga. Bagi keluarga-keluarga Kristen, kejujuran dimulai dari teladan orang tua. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mengajarkan anak-anak mengenai akuntabilitas.

2. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan salah satu prinsip penting untuk dalam kesadaran dan perilaku anti korupsi. Mengutip Kurniawan Bura dan Puspito menuliskan, “Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang.

Dalam prosesnya, transparansi, seperti uraian Bura dan Puspito, dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi.

Transparansi atau keterbukaan dalam PAK Keluarga antara lain berbentuk keterbukaan orang tua, suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya mengenai sumber-sumber pendapatan keluarga. Anak-anak juga perlu diberi pemahaman, antara lain dalam diskusi-diskusi kecil di waktu makan atau menonton televisi mengenai bagaimana orang tua mereka memperoleh uang untuk menafkahi kehidupan keluarga mereka. Termasuk juga kondisi keuangan keluarga sehingga seisi rumah dapat mengetahui dan bahkan memaklumi kondisi keuangan mereka.

Manfaat transparansi dalam keluarga kaitan dengan PAK Keluarga dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat jangka pendek, bahwa antara suami dan istri, dan orang tua dan anak dapat saling mengetahui kondisi riil kehidupan keluarga mereka, terutama dalam hal ekonomi. Hal ini bermaksud untuk mengantisipasi tuntutan-tuntutan kebutuhan dari anggota keluarga yang tidak realistis atau tidak tepat sasaran. Manfaat jangka panjang, sebagai teladan dan pengajaran, nilai transparansi dapat menjadi bekal bagi anak-anak untuk nantinya memasuki dunia kerja dan pula dunia rumah tangga nanti.

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Bura dan Puspito mengatakan, “prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.”

4. Kebijakan

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

4.7 Strategi Tindakan Antikorupsi

Augusto Lopez-Claros mengusulkan enam strategi melawan korupsi.⁵⁶ Keenam strategi tersebut, adalah:

1. Membayar pegawai negeri dengan baik

Menurut Augusto, gaji yang dibayarkan kepada pegawai negeri mempengaruhi motivasi mereka. Jika upah sektor publik terlalu rendah, pegawai

⁵⁶ Augusto Lopez-Claros, "Six Strategies to Fight Corruption", *Worldbank.org*, <http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/six-strategies-fight-corruption>, 14 Mei 2014.

mungkin akan berada di bawah tekanan untuk menambah pendapatan mereka dengan cara "tidak resmi". Mengutip penelitian Van Rijckeghem dan Weder (2001), Augusto mengatakan, pada negara-negara kurang berkembang, terdapat hubungan terbalik antara tingkat upah sektor publik dan kejadian korupsi.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, KPK juga mensinyalir adanya hubungan antara gaji rendah para pegawai negeri dengan praktek korupsi.⁵⁷ Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, rendahnya gaji pegawai negeri juga berhubungan korupsi dalam perizinan. "Gaji yang rendah mendorong pegawai negeri mencari celah dengan mempersulit perizinan. Kemudian, para aparat juga menerima suap untuk mempercepat keluarnya izin usaha."⁵⁸

Hubungan antara gaji yang diterima pegawai negeri dengan perilaku korupsi juga disinyalir oleh Kwik Kian Gie. "Demikian pula kesejahteraan aparatur yang terkait langsung dengan gaji pegawai, jaminan sosial, serta

⁵⁷ "Gaji PNS Rendah, Korupsi Subur di Pemerintahan", *Kpk.go.id*, <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1425-gaji-pns-rendah-korupsi-subur-di-pemerintahan>.

⁵⁸ Randyka Wijaya, "KPK: Tingkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Rendah karena Korupsi", *KBR*, <http://kbr.id/nasional/08-2016/kpk-tingkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-rendah-karena-korupsi/84320.html>, 22 Agus 2016.

fasilitas hidup lainnya sangat jauh dari memuaskan. Inilah salah satu faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik selama ini tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS diyakini telah mendorong mereka ke arah perbuatan tercela dengan melakukan penyelewengan dan KKN.”⁵⁹

2. Menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam belanja pemerintah

Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengolah anggaran dan dana publik. Pemerintah mengumpulkan pajak, memanfaatkan pasar modal untuk mengumpulkan uang, menerima bantuan luar negeri dan mengembangkan mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya ini untuk memenuhi keragaman kebutuhan. Menurut Augusto, beberapa negara melakukan ini dengan cara yang relatif transparan dan berusaha memastikan bahwa sumber daya akan digunakan untuk kepentingan umum. Augusto yakin, “semakin terbuka dan transparan prosesnya, semakin sedikit kesempatan yang akan

⁵⁹ Kwik Kian Gie, “Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan”, Makalah disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari Selasa, 5 Agustus 2003, di Jakarta.

diberikan untuk penyimpangan dan pelecehan. Strategi lain yang berhubungan dengan transparansi untuk memerangi praktek korupsi, menurut Augusto adalah kebebasan pers dan tingkat keaksaraan yang baik. Semua itu perlu didukung oleh peran masyarakat sipil yang aktif dengan budaya partisipasi yang baik pula.

Transparansi dan keterbukaan pengelolaan anggaran oleh pemerintah adalah satu unsur penting dalam mencapai *good governance*. Pendapat kebanyakan pengkaji masalah-masalah birokrasi dan korupsi, bahwa dengan semakin transparan dan terbukannya pemerintah menyusun dan mengolah anggaran, maka hal tersebut dapat menurunkan angka korupsi.

3. *Cutting red tape*

Istilah *Cutting red tape* dalam upaya memberantas korupsi terkait dengan ‘penyederhanaan birokrasi’ atau pemangkasan jalur-jalur birokrasi yang tidak penting. Augusto menjelaskan, terdapat korelasi antara tingkat korupsi dan tingkat birokrasi.

Tingkat birokrasi yang bertingkat-tingkat dan berbelit-belit, misalnya untuk pelayanan publik, mendorong orang untuk melakukan praktek suap dan korupsi. Pelayanan publik di zaman orde baru yang buruk adalah

bukti bahwa sistem birokrasi yang rumit adalah faktor penyebab korupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Konferensi Intenasional tentang Integritas di Sektor Swasta di Jakarta 16 November 2016 mengatakan, “sistem birokrasi yang rumit serta pelayanan publik yang berbelit memaksa masyarakat menggunakan jalan pintas. Akibatnya, tidak sedikit pengusaha yang terlibat dalam kasus suap.” Maka menurut Kalla, untuk mencegah korupsi sektor swasta perlu diciptakan kemudahan. Salah cara adalah menyederhanakan rantai birokrasi dan pelayanan perizinan.⁶⁰

4. Menggantikan subsidi yang regresif dan distortif dengan transfer tunai yang ditargetkan

Menurut Augusto, subsidi adalah contoh lain bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendistorsi insentif dan menciptakan peluang terjadinya korupsi. Menurut sebuah studi IMF (2013), seperti yang dikutip Augusto, subsidi konsumen untuk produk energi mencapai sekitar \$ 1,9 triliun per tahun, setara dengan sekitar 2,5 persen dari PDB global atau 8 persen dari pendapatan pemerintah.

⁶⁰ “Penyederhanaan Birokrasi Tekan Suap”, *Kompas* 17 November 2016.

Subsidi ini didistribusikan dengan sangat cepat, dengan lebih dari 60 persen dari total keuntungan menghasilkan 20 persen rumah tangga terkaya, dalam kasus bensin. Melepaskannya bisa menghasilkan pengurangan emisi CO2 yang signifikan dan menghasilkan efek *spillover* positif lainnya. Subsidi sering menyebabkan penyelundupan, kekurangan, dan munculnya pasar gelap. “Subsidi seringkali dapat menempatkan pemerintah sebagai pusat skema penghasil korupsi. Lebih baik mengganti subsidi mahal dan regresif dengan transfer uang yang ditargetkan,” pendapat Augusto.

Dalam konteks Indonesia, media memberitakan temuan KPK mengenai celah korupsi dalam program pupuk bersubsidi di tingkat perencanaan, penentuan harga pokok penjualan hingga penyaluran komoditas tersebut sepanjang tahun 2014-2016.⁶¹

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian yang terbit pada awal Maret 2017. KPK menemukan kerawanan korupsi di program subsidi di antaranya adalah perencanaan alokasi pupuk dan benih bersubsidi, mekanisme penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan pengawasan yang tak

⁶¹ Anugerah Perkasa, “KPK Endus Bau Korupsi Pupuk Bersubsidi”, CNN, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170321002709-12-201572/kpk-endus-bau-korupsi-pupuk-bersubsidi>, 21 Maret 2017.

maksimal. Kajian itu menyatakan mekanisme penetapan HPP dapat membuka celah transaksional. Selama ini, HPP terbagi menjadi dua yakni HPP awal oleh Kementerian Pertanian dan HPP yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Menetapkan konvensi internasional

Menurut Augusto, karena dalam korupsi ekonomi global semakin memiliki dimensi lintas batas, kerangka hukum internasional untuk pengendalian korupsi merupakan elemen kunci di antara opsi yang terbuka bagi pemerintah. Bingkai ini Pekerjaan telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Selain Konvensi Anti-Suap OECD, pada tahun 2005, Konvensi Menentang Korupsi PBB (UNCAC) mulai berlaku, dan pada akhir tahun 2013 telah diratifikasi oleh mayoritas dari 140 penandatanganannya. UNCAC adalah instrumen yang menjanjikan karena menciptakan kerangka global yang melibatkan negara-negara maju dan berkembang dan mencakup berbagai bidang, termasuk korupsi domestik, korupsi, pemerasan, tindakan pencegahan, ketentuan anti-pencucian uang, undang-undang benturan kepentingan, sarana untuk memulihkan dana terlarang yang disimpan oleh pejabat di bank-bank lepas pantai, antara lain. Karena PBB tidak memiliki kekuatan penegakan hukum,

keefektifan Konvensi sebagai alat untuk mencegah korupsi akan sangat bergantung pada pembentukan mekanisme pemantauan nasional yang memadai untuk menilai kepatuhan pemerintah. Penerapan dan penegakkan hukum antara lain melalui undang-undang antikorupsi yang lebih kuat sangat penting untuk upaya-upaya tersebut.

6. Menyebarkan teknologi cerdas

Sama seperti distorsi yang disebabkan oleh pemerintah memberikan banyak kesempatan untuk korupsi, juga sering terjadi, kontak langsung antara pejabat pemerintah dan warga negara dapat membuka jalan bagi transaksi terlarang. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendorong lebih banyak hubungan antara pejabat dan masyarakat sipil. Dalam upaya-upaya ini internet telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengurangi korupsi.

Memang tidak semua upaya-upaya memberantas korupsi berada langsung dalam wilayah keluarga, namun begitu sebagai warga negara keterlibatan setiap anggota keluarga dalam mendukung pemberantasan korupsi sangatlah penting. Ketika berbicara PAK Keluarga itu berarti berbicara tentang upaya pengembangan

pengetahuan mengenai korupsi, pembentukan kesadaran anti korupsi dan kemampuan-kemampuan dalam mengatasi sejak dini praktek-praktek korupsi.

Bab V
Penutup:
Sebuah Refleksi Teologis

Keluarga adalah bagian dari masyarakat. Nilai dan paham yang dianut oleh setiap anggota keluarga sangat ditentukan oleh kebudayaan yang dikembangkan dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga dalam hubungan dengan pendidikan antikorupsi, atau peran keluarga dalam pendidikan antikorupsi, adalah salah satu cara memerangi korupsi dengan pendekatan kebudayaan.

Paramadina Public Policy Institute dalam kajiannya berjudul “Memahami Korupsi”, menjelaskan, pendekatan budaya berpotensi untuk mempengaruhi sudut pandang masyarakat. Namun, harus diakui, bahwa pendekatan ini, meskipun efisien dari sisi pendanaan, namun sulit diharapkan dapat memberikan hasil dalam waktu singkat. Pendekatan kebudayaan, antara lain melalui keluarga sebagai basis penanaman nilai antikorupsi menyangkut sebuah proses jangka panjang. “Idealnya, pendekatan budaya dimulai sedini mungkin, sehingga peran keluarga

dan pendidikan dasar sangat krusial bagi sukses tidaknya pendekatan ini.”⁶²

Jika salah satu faktor penting penyebab korupsi adalah hasrat, ambisi dan nafsu manusia untuk kaya dan berkuasa, maka keluarga menjadi penting. Sebab, setiap orang atau manusia lahir dan berkembang dari keluarga. Meskipun kenyataannya, faktor-faktor eksternal, seperti gaya hidup, jabatan, kekuasaan sejatinya sudah bukan merupakan urusan keluarga atau relatif tidak lagi dapat dijangkau oleh kontrol nilai-nilai keluarga yang diwariskan generasi ke generasi.

Pendidikan di dalam keluarga terjadi secara informal. Penanaman nilai dan moral serta etika pertama-tama terjadi di dalam keluarga. Menurut Arief Saefudin, keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, menurutnya, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia.⁶³

⁶² Paramadina Public Policy Institute, “Memahami Korupsi”, <https://policy.paramadina.ac.id/memahami-korupsi/>,

⁶³ Arief Saefudin, “Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Rumah Hingga Sekolah” *Anti-Corruption Clearing House*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/pendidikan-dan-budaya-antikorupsi-di-rumah-hingga-sekolah>, 08 Januari 2016.

Pendidikan antikorupsi berbasis keluarga berhubungan dengan pendidikan karakter. Hal yang sederhana, misalnya dimulai dengan pendidikan yang membiasakan diri tidak melakukan berbagai kecurangan, seperti tidak mencontek dan korupsi kecil-kecilan. Pendidikan antikorupsi membutuhkan restorasi cara berpikir dan bertindak. Pendidikan mesti lebih berfokus untuk memberi inspirasi dan motivasi bagi setiap orang untuk mengejar kebaikan bersama dengan pengetahuan yang tidak terkorupsi dan diperoleh bukan dengan cara curang dan plagiarisme.⁶⁴

Secara teologis, akar sikap, perilaku dan mental korup adalah keserakan yang ada pada manusia. Alkitab mengecam keserakahan sebagai bagian dari dosa (Mrk. 7:22; Rom. 1:29; Ef. 5:3; Kol. 3:5; II Pet. 2:14). Sistem politik dan ekonomi yang didesain oleh para penguasa yang dimotivasi oleh niat kaya sendiri menyebabkan korupsi dalam berbagai lini. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan, dikembangkan dan ditanamkan oleh keluarga-keluarga Kristen seharusnya dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam mengatasi perkembangan praktek korupsi.

⁶⁴ Suhartono, "Apakah Keluarga Kita Sudah Turut Ambil Bagian"? dalam Maria Hartiningsih (ed.) *Korupsi yang Memiskinkan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 133, 134.

Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata 'keserakahan' diterjemahkan dari kata Yunani 'pleonexia' yang dapat berarti: "hasrat untuk memperoleh lebih banyak (hal) atau juga nafsu untuk sejumlah besar hal-hal duniawi yang melampaui apa yang Tuhan tentukan'.

Jack Wellman,⁶⁵ menuliskan, hal keserakahan dikecam oleh alkitab karena itu adalah dosa. Nafsu untuk memperoleh yang bukan milik sendiri atau ingin mendapatkan yang lebih dari yang semestinya seperti yang tampak dalam kehidupan sekuler, menurut Wellman itu dekat dengan mencuri di dalam hati seperti yang Yesus katakan.

Godaan pada setiap manusia yang datang kapan saja dan dalam situasi bagaimanapun adalah keinginan atau nafsu memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Setiap manusia dan keluarga tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, cara hidup mewah sering membutuhkan yang lebih dari apa yang semestinya didapat. Korupsi dalam sebuah sistem politik dan ekonomi telah mengeksploitasi keinginan yang ada pada setiap manusia, sehingga dari kebutuhan yang wajib dan wajar dipenuhi

⁶⁵ "What Is The Sin Of Covetousness In The Bible?", <http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2015/12/25/what-is-the-sin-of-covetousness-in-the-bible/>.

menjadi 'keserkahan' atau 'ketamakan' yang tidak terkendali.

Greg Sargent mengajukan pertanyaan, "Apakah mengingini masalah yang harus kita anggap serius?" Sargent kemudian mengutip Kolose 3: 5. Di dalamnya, rasul Paulus memberi arahan untuk "mematikan" keinginan daging, termasuk "keserakahan, yang adalah penyembahan berhala." Mengapa keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala?

Di dalam 1 Korintus 12:31 disebutkan di situ, bahwa hal "mengingini" adalah wajar, bahkan itu dapat menjadi sikap rohani. Namun, dalam konteks ini, menurut Sargent, hendaknya hal mengingini itu diarahkan pada hal-hal baik yang Tuhan harapkan. Salah satu karunia itu, menurut Sargent, seperti yang dijelaskan oleh Paulus, adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang meneguhkan, menasihati dan menghibur. Ini adalah contoh utama dari kerinduan untuk menginginkan sesuatu yang baik. Keinginan pada dasarnya tidak jahat, tetapi penyaluran kerinduan terhadap apa bukan sebagai hak atau obsesi yang merusak adalah dosa ketamakan. 'Keinginan' yang tidak untuk kebaikan adalah keserakahan sebagai dosa. Sikap, perilaku, mental dan perbuatan korupsi adalah keinginan yang tidak terkendali.

Kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan adalah sesuatu yang dasariah bagi setiap keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan primer itu maka manusia bekerja. Bekerja yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bekerja secara benar, adil dan jujur. Dengan prinsip ini, maka hasil yang diharapkan dari bekerja adalah sesuai dengan apa yang diberikan.

Namun, keserakahan membuat kebutuhan menjadi keinginan. Pada tingkat dan bentuk tertentu, keinginan itu adalah wajar. Bahkan, seperti sudah disinggung di atas, keinginan terhadap hal-hal yang baik, bahkan diwajibkan. Tetapi, keinginan yang berkaitan dengan korupsi adalah keinginan dalam pengertian mengingini lebih dari apa yang dihasilkan dari kerja.

Mengapa hal itu terjadi? Penyebabnya, selain keserakan yang merupakan kecenderungan namun juga karena perubahan-perubahan gaya hidup. Gaya hidup mewah, suka berpesta pora, konsumersi dan hedonis membuat orang mengingini lebih dari yang dibutuhkannya.

Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi mengatakan, “Sifat keserakahan, kerakusan, dan tindakan yang tidak berdasarkan pada hati yang terdalam (nurani) telah

membuat manusia tidak akan pernah puas.”⁶⁶ Nurani mestinya menjadi alat kontrol bagi manusia untuk tidak mengingini lebih dari apa yang dia mampu atau miliki. Termasuk adalah menjadi alat bagi manusia dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat. Ketika nurani diabaikan, maka terjadilah korupsi.

H. L. E. Luering⁶⁷ membahas tentang ‘korupsi’ menurut alkitab antara lain dengan merujuk pada kata-kata Ibrani ‘mishchath’, ‘mashchath’, ‘mashchith’, dan padanan Yunani, ‘phthora,’ dan ‘diaphthora,’ dengan banyak turunan dan kata kerja serumpun, untuk menyebut ‘korupsi’ yang kesemuanya menyiratkan degenerasi dan pembusukan fisik (Ayub 17:14; Kisah 2:27, dll.). Istilah ‘shachath’, yang diterjemahkan oleh Versi King James dengan "korupsi" dalam Yunus 2: 6, seharusnya diterjemahkan menjadi "lubang," seperti dalam Mazmur 30: 9; 35: 7 dan ‘passim’, sementara ‘shachath’ dalam Yesaya 38:17 yang berarti kehancuran.

Dampak korupsi sangatlah massif. Uang negara yang diperuntukan bagi pembangunan sebagai hak rakyat, ketika dikorupsi oleh sekelompok kecil orang, maka akan

⁶⁶ Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, (Deepublish, 2018), 135.

⁶⁷ Orr, James, M.A., D.D. General Editor. "Entry for 'CORRUPTION'". "International Standard Bible Encyclopedia". 1915.

menyebabkan ketimpangan, keterbelakangan, kebodohan yang berujung pada kemiskinan. Rantai masalah ini akan meliputi juga kekerasan, atau tindakan-tindakan kriminal lainnya. Situasi yang demikian, dalam bahasa rohani adalah maut.

Menolak korupsi dengan cara edukasi secara teologis berarti pula menolak 'maut', 'kehancuran' atau 'kebinasaan' kehidupan. Injil Yesus Kristus yang menjadi substansi pengajaran PAK Keluarga berbicara tentang kehidupan atau perjuangan untuk mengusahakan kehidupan yang benar dan lestari untuk sekalian ciptaan.

Gerakan melawan korupsi yang dimulai dari individu dan keluarga adalah gerakan untuk memperjuangkan kelestarian hidup. Injil Yesus Kristus memproklamasikan *Shalom*, yaitu situasi hidup bersama yang damai, adil dan sejahtera.

Korupsi yang memiliki dampak luas bagi kehidupan, adalah dosa yang harus digumuli oleh PAK Keluarga. Rumah tangga atau keluarga Kristen sangat penting dalam pengajaran nilai-nilai Kristiani. Menurut Homrighausen dan Enklaar, "Rumah-tanggalah yang dapat menanamkan dalam batin anak-anak muda pengertian akan dua hal yang merupakan inti-sati pengajaran agama Kristen, yakni

apakah taurat dan anugerah.”⁶⁸ Sebagai persekutuan yang membentuk masyarakat, rumah tangga atau keluarga juga sebagai basis dari persekutuan Kristiani. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara gereja sebagai persekutuan dengan keluarga-keluarga yang merupakan unit terkecil.

Peran keluarga dalam PAK menurut Homrighausen dan Enklaar sangatlah penting. Secara teologis dipahami bahwa keluarga Kristen adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai harganya.⁶⁹ Alkitab mengisahkan kehidupan keluarga-keluarga sebagai basis kehidupan keagamaan, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.

Dengan demikian, maksud PAK Keluarga adalah sebagai *upaya gereja untuk mengusahakan pengajaran mengenai Injil Kerajaan Allah dan implementasi praktisnya dalam kehidupan nyata yang menjangkau unit terkecil namun akrab dan intim, yaitu keluarga yang kemudian menjadikan persekutuan keluarga itu sebagai wadah pengajaran dan penanaman nilai kristiani.*

Keluarga Kristen adalah basis edukasi pendidikan anti-korupsi. Gereja yang yang beranggotakan individu-individu yang berasal dari keluarga-keluarga Kristen dapat

⁶⁸ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 124.

⁶⁹ Homrighausen, Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*, 128.

dikatakan sebagai persekutuan kristiani yang senantiasa memusatkan kebenaran Injil sebagai dasar kehidupannya. Pengetahuan, kesadaran serta komitmen anti korupsi hendaknya dimulai dari basis-basis keluarga. Kesemuanya itu sesungguhnya merefleksikan komitmen pada Injil Yesus yang menyelamatkan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2017", *Berita Resmi Statistik* No. 66/Th. XX, Juli 2017.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI nomor 20 tahun 2001 versi UU RI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Eminyan, SJ, Maurice, *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Gie, Kwik Kian, "Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan", Makalah disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari Selasa, 5 Agustus 2003, di Jakarta.
- Groome, Thomas H., *Christian Religious Education: Pendidikan Agama Kristen: Berbagai Cerita dan Visi Kita*, cetak I 1980. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Homrighausen, E.G., Enklaar, I.H., *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.

- Hartiningih, Maria, (Ed.), *Korupsi yang Memiskinkan*.
 Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.
- Holmes, Leslie, *Corruption: A Very Short Introduction*. Oxford:
 Oxford University Press, 2015
- ICW, *Annual Report 2016 Indonesia Corruption Watch: Menyemai Semangat Anti Korupsi*. ICW: Jakarta, 2016.
- Irving B. Weiner, Donald K. Freedheim, Richard M. Lerner (ed.), *Handbook of Psychology, Vol. 6 Developmental Psychology*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc., 2003.
- Kitgaard, Robert, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: KPK, 2017.
- Koesoema A., Doni, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ihromi T.O., (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ismail, Andar (ed.), *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Ismail, Andar (ed.), *Mulai dari Musa dan Segala Nabi. Begining with Moses and All the Prophets*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003
- Ismail, Andar, *Selamat Ribut Rukun!*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

- Rantung, Djoys Anneke, *Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Pryhantoro, Edy Herry, *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Spasi, 2016.
- Pr, St. Darmawijaya, *12 Pola Keluarga Beriman*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed., *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- “Penyederhanaan Birokrasi Tekan Suap”, *Kompas* 17 November 2016.
- Schilder, H. J., *Education and Upbringing in the Old Testament*, dalam The Interleague Publication Board. Vol. 1 Sept 1970 No. 1 and Vol. 1 Nov. 1970 No. 2.
- Simanjutak, Bungaran Antonius, (ed.), *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Wijayanto, (ed.), *Mengorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Winarno, Budi, *Globalisasi: Peluang dan Ancaman Bagi Indonesia*

Internet

“Corrupt”,

http://etymonline.com/index.php?term=corrupt&allowed_in_frame=0

“Corruption”,

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption>

“Korupsi”, <http://kbbi.web.id/korupsi>

The World Bank, “What is Fraud and Corruption?”,

<http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption>

KPK, “KPK: Jangan Menganggap Korupsi itu Budaya”,

<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3617-kpk-jangan-menganggap-korupsi-itu-budaya>

“Sepanjang 2016, Negara Rugi Rp 3 Triliun Dari Kasus Korupsi”,

<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/04/063852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi>

‘Keluarga’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

<https://kbbi.web.id/keluarga>.

United Nations, “The Family, its Roles, Composition and Structure”,

<http://www.un.org/popin/icpd/prepcomm/official/rap/RAP4.html>

- Herien Puspitawati, "Konsep dan Teori Keluarga",
<http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf>
- Augusto Lopez-Claros, "Six Strategies to Fight Corruption",
Worldbank.org,
<http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/six-strategies-fight-corruption>, 14 Mei 2014.
- "Gaji PNS Rendah, Korupsi Subur di Pemerintahan",
Kpk.go.id, <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1425-gaji-pns-rendah-korupsi-subur-di-pemerintahan>.
- Randyka Wijaya, "KPK: Tingkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Rendah karena Korupsi", *KBR*,
http://kbr.id/nasional/08-2016/kpk_tingkat_kemudahan_berbisnis_di_indonesia_rendah_karena_korupsi/84320.html, 22 Agus 2016.
- Anugerah Perkasa, "KPK Endus Bau Korupsi Pupuk Bersubsidi", *CNN*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170321002709-12-201572/kpk-endus-bau-korupsi-pupuk-bersubsidi>, 21 Maret 2017.
- Paramadina Public Policy Institute, "Memahami Korupsi",
<https://policy.paramadina.ac.id/memahami-korupsi/>,
- Arief Saefudin, "Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Rumah Hingga Sekolah" *Anti-Corruption Clearing*

House, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/pendidikan-dan-budaya-antikorupsi-di-rumah-hingga-sekolah>, 08

Januari 2016.

“What Is The Sin Of Covetousness In The Bible?”,

<http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2015/12/25/what-is-the-sin-of-covetousness-in-the-bible/>.



CURICULUM VITAE

Nama: Pdt. Dr. Dyoyo Anneke Rantung, MTh

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 18 Januari 1967

NIDN : 0318016704

Alamat: Perumahan Puri Sriwedari Blok B No. 8, Jl. Alternatif
Cibubur

Email : djoys.anneke@gmail.com

Nama Suami : Kenny Evert Karundeng

Nama Anak-anak : 1. Nathasya Grace Etsuko Karundeng

2. Davis Kennedy Karundeng

Pendidikan

1. SD GMIM X Manado, lulus tahun 1981
2. SMP Negeri IV Manado, lulus tahun 1983
3. SMA Negeri II Manado, lulus tahun 1986
4. Fakultas Theologia UKI – Tomohon, lulus tahun 1991
5. Magister Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen
Indonesia, lulus tahun 2009
6. Doktor Theologia di STT Cipanas, lulus tahun 2016

Judul Skripsi, Tesis dan Disertasi:

1. Skripsi

Judul : “Pastoral bagi Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Tuminting”

Dosen Pembimbing: Pdt. Joula Wuysang, M.Th.

Lulus Tahun 1991

2. Tesis

Judul : “Hubungan antara Kreatifitas Pelayanan dan
Pemanfaatan Media dengan Spiritualitas Lansia di
Jemaat GPIB Agape Cibubur”

Dosen Pembimbing:

- Dr. Anung Haryono, M.Sc., CAS
- Pdt. Carolien Pattiasina Toreh, M.Th

Lulus Tahun 2009

3. Disertasi

Judul: “Resolusi Konflik dalam Organisasi: Suatu Kajian dari
Perspektif Pendidikan Perdamaian terhadap Kasus
Knflik UKIT”

Dosen Pembimbing:

- Dr. Daniel Nuhamara
- Dr. Daniel Stefanus

Riwayat / Pekerjaan / Pelayanan :

1. Vicaris di Jemaat GMIM Bukit Moria Winangun, tahun 1993
2. Pendeta Pelayan di Jemaat GMIM Bukit Moria Winangun-
Manado,
tahun 1993-1994
3. Pendeta Pelayan di Jemaat GMIM Bethesda Manado, tahun
1995-1997
4. Pendeta Konsulen POUK Dian Kasih Cimanggis, tahun 1998-
2001
5. Pendeta Pelayanan/domisili di GPIB Agape Cibubur-Jakarta
Timur,
tahun 2001-2011
6. Ketua II Badan pekerja Harian Sinode Am Gereja Protestan di
Indonesia, tahun 2010-2015
7. Pendeta Pelayanan/domisili di jemaat GPIB Trinitas Kota
Wisata Cibubur, tahun 2012 s.d.2016
8. Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Jakarta Bogor Depok
Tangerang Bekasi (Jabodetabek), Tahun 2017
9. Dosen Pendidikan Agama Kristen di Universitas Indonesia
(UI) sejak 2010 s.d. sekarang
10. Dosen Pasca Sarjana Pendidikan Agama Kristen Universitas
Kristen Indonesia Jakarta sejak 2010 s.d. sekarang
11. Pengajar Kursus Alkitab “Living Stone” di Gereja Imanuel
Lapas Kelas IIA Salemba, 4-29 November 2018

Riwayat Organisasi:

1. Pelatihan Konselor HIV Aids oleh Yayasan HIV Aids Indonesia, tahun 2012
2. Sekretaris Panitia Nasional Seminar Oikoumene, tahun 2013
3. Moderator Seminar Nasional Oikoumene di Jakarta, tahun 2013
4. Moderator Seminar Nasional Oikoumene di Sorong Papua, tahun 2014
5. Ketua Panitia Serah Terima Pengurus Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, tahun 2014
6. Ketua Panitia Pelaksana Program Kerja Gereja Protestan di Indonesia (GPI), tahun 2014-2015
7. Wakil Ketua Panitia HUT 65 Tahun PGI, tahun 2015
8. Peserta “Kirchen Tag” di Jerman, tahun 2005

Seminar Sebagai Peserta:

1. Learning Without Borders Embedding ICT in Effective Classroom Practice, Pelaksana Microsoft Indonesia Office
2. Religion In East And West – Comparison on Indonesia and USA, 13 Febuari 2017
3. Entitled Preparing The Modern World: The Historical and Cultural Significance of The Reformation held on November 6th, 2017 at Christian University of Indonesia, Jakarta, Indonesia

4. Pendampingan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa Kemenristekdikti Republik Indonesia di UKI Jakarta, 21 Maret 2019
5. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Tengah Kemajemukan Indonesia oleh Gereja Protestan di Indonesia, 1 Juni 2013
6. Melawan Ketidakadilan oleh Gereja Protestan di Indonesia, 26 Februari 2016
7. Mengkritisi Ajaran Yohanes Calvin dan Relevansinya Bagi Kehidupan Bergereja oleh Gereja Protestan di Indonesia, 21-24 Juli 2013
8. Pendidikan Politik Bagi Warga Gereja oleh Gereja Protestan di Indonesia, 8-10 Maret 2012
9. God's Business, oleh Program Pasca Sarjana Manajemen UKRIDA Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, 21 November 2009

Pelatihan/Workshop:

1. Pelatihan Fasilitator dan Konselor HIV & AIDS oleh Yayasan Aids Indonesia, 27 Agustus 2012
2. Pelatihan Tenaga Pendidik Universitas Kristen Indonesia, 27-29 Agustus 2015
3. Pelatihan Dosen Pembimbing Akademik Universitas Kristen Indonesia, 31 Oktober-01 November 2018

4. Workshop Blended Learning, 7 Februari 2019
5. Workshop Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0), 29 Januari 2019
6. Bimbingan Teknis Penulisan Buku Nonfiksi oleh Institut Penulis Indonesia, 17 Juni 2019

Sebagai Moderator/Pembicara:

1. Pembicara Seminar “Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Memajukan Naradidik di Era MEA”, 20 Mei 2016
2. Pembicara Seminar “Pendidikan Agama Kristen dalam Era Milenial” di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, 21 Mei 2019
3. Moderator Seminar dan Call for Papers “Membangun Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0”, 07 November 2018

Panitia/Pengurus Lembaga:

1. Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional Kebangsaan “Merawat Kemajemukan dalam Bingkai NKRI” Universitas Kristen Indonesia, 5 April 2017.
2. Ketua Panitia Konsultasi Nasional Perempuan Indonesia PGI, tahun 2016
3. Ketua Panitia Pelaksana Program Kerja Gereja Protestan di Indonesia (GPI), tahun 2014-2015
4. Wakil Ketua Panitia HUT 65 Tahun PGI, tahun 2015

5. Wakil Ketua Panitia Pelaksana Peresmian Gedung PGI “Grha Oikumene”, tahun 2014
6. Bendahara Panitia Pelaksana Seminar Agama dan Politik Global, 2017
7. Bendahara Lembaga Penanggulangan Bencana Gereja Protestan Indonesia
8. Bendahara Yakoma PGI, tahun 2010-2014
9. Pengurus Yayasan Oikumene PGI, tahun 2016

Piagam Penghargaan:

1. Juara 1 Lomba Penulisan Naskah Ketahanan Keluarga di tinjau dari Agama Islam, Katholik, Protestan, Budha dan Hindu dalam rangka menyongsong hari Ibu Tahun 1997 oleh Menteri Negara Kepundudukan/Kepala BKKBN
2. Wisudawan Lulusan Terbaik Tahun Akademik 2008/2009, Universitas Kristen Indonesia

Pembicara / Pelayanan di Luar Negeri :

Pembicara dalam acara Perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Oikumene Minahasa Nederland, Belanda, tahun 2008

Publikasi Buku / Majalah / Jurnal :

1. PAK Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk, dalam Bunga Rampai Buku ke-2 – Perjalanan Semua Mendayung, Penerbit : UPPI STT Jakarta, Tahun 2014
2. Resolusi Konflik Dalam Organisasi – Kajian dari Perspektif Pendidikan Perdamaian terhadap Kasus Konflik di Lembaga Pendidikan, Penerbit BPK Gunung Mulia, Tahun 2017
3. Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk, Penerbit Lintang Yogyakarta, Tahun 2017

Jurnal:

1. Jurnal Shanan Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, “Peran Pendidikan Perdamaian kaitannya dengan PAK dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”
2. Jurnal Shanan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017, “Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk di Indonesia”
3. Jurnal Shanan Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, “Peran PAK dalam Gereja untuk Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme Agama di Kalangan Generasi Muda”
4. Jurnal Shanan Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018, “Evaluasi Implementasi PAK Keluarga di GKRI Jemaat Diaspora Cawang Jakarta Timur”

5. Jurnal Voice of Wesley Volume 2 Nomor 1 November 2018, “Teologi Politik untuk Keadilan Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas”

Majalah:

1. Menghargai Kemajemukan – Agenda Utama Pengajaran PAK, Majalah Inspirasi, 2015
2. Gerakan Oikoumene, Majalah Narwastu, April 2015
3. Gerakan Oikoumene Adalah Gerakan Pemersatu, Majalah Berita Oikoumene, edisi April 2015
4. Sosialisasi Pendidikan Perdamaian, Majalah Narwastu, edisi Juni 2016
5. Sosialisasi Pendidikan Perdamaian, Majalah Inspirasi, edisi Juni 2016
6. Tekad Kuat Modal Menjadi Pendeta, Majalah Gaharu, edisi Agustus 2016
7. Penghargaan Tokoh Kristiani 2016 Pilihan Majalah Narwastu, Majalah Narwastu, edisi Januari, Februari dan Maret 2017



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Percetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-7256-54-0

